



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
BALAI PENGELOLA TRASPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani M Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	10/1/2021	
2	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.AP.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	10/1/2021	
3	Diperiksa	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10/1/2021	
4	Disetujui	Edi Kurniadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10/1/2021	
5	Disetujui	Djoko Srijanto, ATD., M.Si.	Kepala Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis	11/1/2021	
6	Disetujui	Tofan Muis, A.Md., LLAJ., S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	11/1/2021	
7	Disetujui	Rudu Sutrisno,	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan	11/1/2021	
8	Disetujui	Denny Michels Adlan, S.T., M.M.	Kepala BPTD Wil. IX Jabar	12/1/2021	



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20 21

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WIL. IX PROVINSI JAWA BARAT



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat151



ditjen_hubdat



hubdat.dephub.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Draft Rencana Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 18 (delapan belas) dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan dengan sangat baik. Dengan hasil 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan yaitu sebesar 102,65%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan sangat baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam draft Rencana Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.



KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sebagai instansi pemerintah yang mandiri, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat juga perlu untuk menyusun sebuah Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap triwulanan, adapun untuk posisi triwulan IV menjadi sebuah Laporan Kinerja secara keseluruhan di akhir tahun. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2021 maupun laporan kinerja selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode tahunan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Bandung, 12 Januari 2022

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat,**


DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

DAFTAR ISI

	RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	I.1 Latar Belakang.....	1
	I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
	I.3 Sumber Daya Manusia.....	5
	I.4 Potensi, Isu, Strategis dan Permasalahan.....	5
	I.4.1 Kewenangan.....	5
	I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	6
	I.4.3 Anggaran.....	6
	I.4.4 Isu Strategis.....	6
	I.4.5 Ruang Lingkup.....	7
	I.5 Sistematika Pelaporan.....	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	15
	II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	15
	II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
	III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	31
	III.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	31
	A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Atarmoda Transportasi.....	34
	A.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	34
	A.1.1 Definisi Indikator Kinerja.....	34
	A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	35
	A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	36
	A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang.....	37
	A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	37
	A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024.	38
	A.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.....	39
	A.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	39
	A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	39
	A.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang.....	39

A.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	39
A.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	40
A.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi.....	41
A.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	41
A.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	42
A.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	42
A.3.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	43
A.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	43
A.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	43
A.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda.....	44
A.4.1	Definisi Indikator Kinerja.....	44
A.4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	45
A.4.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	45
A.4.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	46
A.4.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	46
A.4.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	46
A.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kepirintisan Angkutan Penyeberangan.....	47
A.5.1	Definisi Indikator Kinerja.....	47
A.5.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	47
A.5.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	48
A.5.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	48
A.5.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	48
A.5.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	48

A.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.....	49
A.6.1	Definisi Indikator Kinerja.....	49
A.6.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	50
A.6.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	50
A.6.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	50
A.6.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	50
A.6.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	51
B.	SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	52
B.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A.....	52
B.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	52
B.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	53
B.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	53
B.1.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	53
B.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	53
B.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	54
B.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.....	54
B.2.1	Definisi Indikator Kinerja.....	54
B.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	55
B.2.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	55
B.2.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	55
B.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	56
B.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	57
B.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.....	58
B.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	58
B.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	58
B.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	59
B.3.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang	59

	akan datang.....	59
B.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	59
B.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	60
C.	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	61
C.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	61
C.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	61
C.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	62
C.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	62
C.1.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	63
C.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	64
C.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	64
C.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	65
C.2.1	Definisi Indikator Kinerja.....	65
C.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	65
C.2.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	66
C.2.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	66
C.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	67
C.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	67
C.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas ZOOS, RASS, Dan Batas Kecepatan.....	68
C.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	68
C.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	68
C.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	69
C.3.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	69
C.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	70
C.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021	70

	Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	
C.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif.....	71
C.4.1	Definisi Indikator Kinerja.....	71
C.4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	71
C.4.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	72
C.4.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	72
C.4.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	72
C.4.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	73
C.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	74
C.5.1	Definisi Indikator Kinerja.....	74
C.5.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	74
C.5.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	75
C.5.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	75
C.5.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	75
C.5.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	76
C.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*.....	76
C.6.1	Definisi Indikator Kinerja.....	76
C.6.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	77
C.6.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	77
C.6.4	Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	77
C.6.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	78
C.6.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	78
C.7	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	79
C.7.1	Definisi Indikator Kinerja.....	79
C.7.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	80

	C.7.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	80
	C.7.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	81
	C.7.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	81
	C.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	81
	C.8 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.....	82
	C.8.1 Definisi Indikator Kinerja.....	82
	C.8.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	82
	C.8.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	83
	C.8.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	83
	C.8.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	83
	C.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	84
D.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	84
	D.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	85
	D.1.1 Definisi Indikator Kinerja.....	85
	D.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	85
	D.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	86
	D.1.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.....	86
	D.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	86
	D.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024..	86
III.3	Realisasi Anggaran.....	87
	III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	87
	III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	92
	III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	96
	III.3.4 Hambatan dan Kendala.....	97
BAB IV	PENUTUP.....	98
IV.1	Penutup.....	98
	IV.1.1 Ringkasan Capaian.....	98
IV.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun LKIP sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKIP oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulanan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

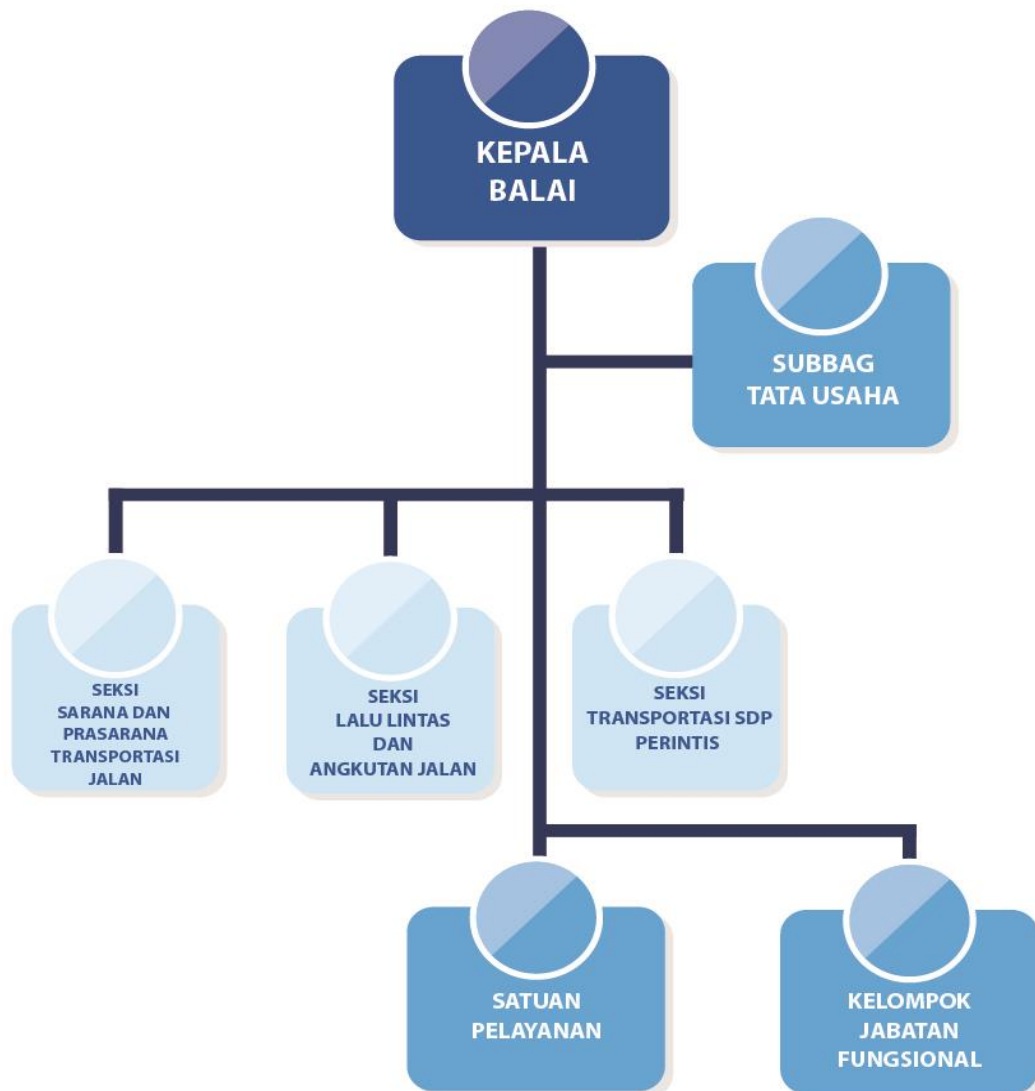
1. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum di usahakan secara komersial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan industri karoseri;
 - c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE B



Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPTD Tipe B dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan barang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Satuan Pelayanan

Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2021 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 469 (empat ratus enam puluh sembilan) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		PNS	PPNPN	JUMLAH
A	Kantor Induk	30	58	88
B	Satpel Terminal			
	1. TTA Harjamukti-Cirebon	22	22	44
	2. TTA Indihiang – Tasikmalaya	28	27	55
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	21	38	59
	4. TTA Ciakar – Sumedang	12	27	39
	5. TTA Guntur Melati – Garut	27	39	66
	6. TTA Banjar	17	34	51
	7. TTA Cikampek	3	13	16
	8. TTA Subang	10	27	37
	9. TTA Kertawangunan – Kuningan	14	26	40
	10.TTA Leuwipanjang – Bandung	3	54	57
C	Satpel UPPKB			
	1. UPPKB Balonggandu – Karawang	18	21	39
	2. UPPKB Losarang – Indramayu	10	28	38
	3. UPPKB Kemang - Bogor	11	13	24
	4. UPPKB Tomo – Sumedang	14	17	31
	5. UPPKB Gentong – Tasikmalaya	17	17	34
	6. UPPKB Cibaragalan (belum operasi)	2	4	6
	7. UPPKB Bojong - Cianjur (belum operasi)	1	2	3
	8. UPPKB Sindangrasa - Ciamis (belum operasi)	1	1	2
TOTAL		261	468	729

Tabel I.1 Komposisi Pegawai BPTD JABAR Tahun 2021

Sumber : Pengelola Kepegawaian (Posisi 31 Desember 2021)

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1. Kewenangan

- a. *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*
 - 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. *PM No. 122 Tahun 2018*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama dalam rangka penunjang pelaksanaan tupoksi sejalan dengan program kinerja yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;

3. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
4. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
5. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
6. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
7. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
8. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
9. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal Tipe A dan UPPKB serta Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat IX Jawa Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021
- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi

A.3.1 Definisi Indikator Kinerja

- A.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

- A.4.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.5. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- A.5.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.5.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.5.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.5.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

A.6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- A.6.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.6.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.6.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.6.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.6.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- A.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

B.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

- B.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

- C.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.7. IKK 7.a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- C.7.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.7.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

C.8. IKK 7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- C.8.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.8.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.8.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- C.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- C.8.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

D. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

- Pagu Anggaran
 - Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021
 - Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2021
 - Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021
 - Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
 - Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
3. Rencana Aksi Tahun 2021;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2021;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2021 sesuai draft Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat 2020-2024.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Pada awal penyusunannya, Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat masih mengacu pada format lama dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Penyusunan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal	lokasi	1
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)		
		• Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri		
		a. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 4 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	17

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan		
		• APJ	m'	821
		• Rambu	buah	334
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	616
		• Warning Light	unit	65
		• Jumlah ATCS Baru	paket	2
		IKK 5 Penyusunan Bahan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4
		a. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• APJ	unit	212
		• Warning Light	unit	2
		• APIL	paket	3
		IKK 6 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan		
		a. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2021		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	20

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	Laporan	1
		IKK 12 Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
		IKK 13 Monitoring dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Laporan	1
		IKK 14 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai		
		a. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	Laporan	1
		b. Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	Laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di BPTD	IKK 15 NILAI AKIP	Nilai	80
		IKK 16 Tingkat Penyerapan Anggaran	%	98
		IKK 17 Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		IKK 18 Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

Adapun dalam perkembangannya, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini mengalami perubahan, Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan	%	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP		
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

II.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Pada awal penyusunannya, Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat masih mengacu pada format lama dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Penyusunan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal	lokasi	1
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)		
		• Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri		
		a. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1
		IKK 4 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	17
		a. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan		
		• APJ	m'	821
		• Rambu	buah	334
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	616
		• Warning Light	unit	65
		• Jumlah ATCS Baru	paket	2
		IKK 5 Penyusunan Bahan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4
		b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• APJ	unit	212
		• Warning Light	unit	2
		• APIL	paket	3

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 6 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan		
		b. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2021		
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	20
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	Laporan	1
		IKK 12 Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 13 Monitoing dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Laporan	1
		IKK 14 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai		
		c. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	Laporan	1
		d. Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	Laporan	1
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di BPTD	IKK 15 NILAI AKIP	Nilai	80
		IKK 16 Tingkat Penyerapan Anggaran	%	98
		IKK 17 Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		IKK 18 Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Rp. 6.036.848.000
2.	Terminal Penumpang Tipe A dikelola	Rp. 24.757.437.000
3.	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	Rp. 10.000.000.000
4.	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Rp. 4.720.279.000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
5.	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Rp. 5.899.400.000
6.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 9.614.836.000
7.	Rehabilitas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB Losarang) (Lanjutan Tahap II)	Rp. 9.162.222.000
8.	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Rp. 7.289.550.000
9.	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	Rp. 300.000.000
10.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Rp. 40.959.342.000
11.	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 5.702.000.000
12.	Oprasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 6.735.937.000
13.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Rp. 400.000.000
14.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 36.119.072.000
TOTAL		RP 167.696.923.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini mengalami perubahan, Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 I ini dikarenakan adanya perubahan format dan jumlah anggaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.926.269.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 34.653.870.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 104.049.479.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.035.605.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 7.035.937.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 33.189.475.000
	TOTAL	RP 188.898.635.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis pandemi Covid-19. Dalam perubahan pagu anggaran terakhir di BPTD Jabar IX, terdapat pula anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Akselerasi PEN. Sesuai DIPA Revisi terakhir terdapat penambahan anggaran dalam rangka program peningkatan/revitalisasi Terminal Tipe-A Banjar dengan skema pendanaan SBSN.

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	antarmoda transportasi	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.583.575.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 50.405.870.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 101.569.964.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.747.845.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 9.129.773.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 31.304.865.000
	TOTAL	RP 202.741.892.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat pada khususnya, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah IX Jawa Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dari total 18 (delapan belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian BPTD Wilayah IX Jawa Barat maka diperoleh data Capaian Kinerja adalah sebesar **102,65 %**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel III.1 Tabel Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi					100%			110%			104.76%			100%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	25	25	100%	50	50	100%	75	75	100%	100	100	100%
IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	10	3	3	100%	5	8	160%	7	9	129%	10	10	100%
IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%			116.67%			104.37%			100%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	25	25	100%	50	75	150%	75	85	113.13%	100	100	100%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					100%			104.17%			102.42%			100%
IKK 3.1	Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	20	20	100%	40	60	150%	60	70	116.67%	80	80	100%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	10	10	100%	15	25	33.33%	25	31	76%	35	35	100%
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	21	5	5	100%	10	15	150%	15	19	126.67%	21	21	100%
IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			107,71%			102.89%			100%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						100%			107,96%			103.39%			100%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKP ≥ 100%)						18			18			18			18
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%)						-			-			-			-

Sumber : Aplikasi ePerformance Kemenhub (<http://eperformance.dephub.go.id> Posisi 31 Desember 2021)

A. SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 1.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;
2. IKK 1.2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda;
3. IKK 1.3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi;
4. IKK 1.4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
5. IKK 1.5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
6. IKK 1.6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

A.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b) Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c) Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d) Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e) Mencantumkan informasi Trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f) Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g) Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

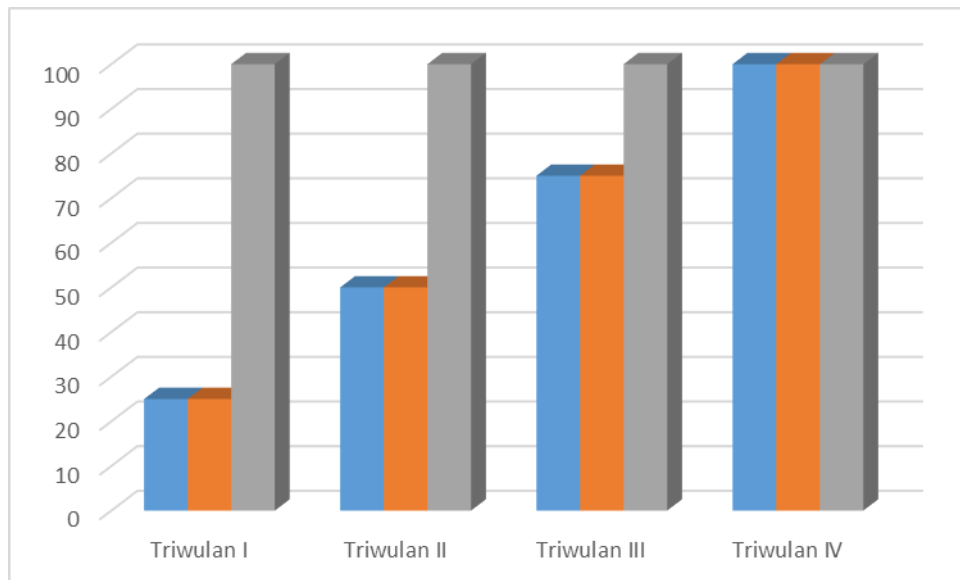
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi pada Tahun 2021}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	25	50	75	100
REALISASI 	25	50	75	100
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2021 didukung dengan kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis berupa pemberian subsidi angkutan keperintisan di wilayah Bandung dan Bogor berdampak pada terlayannya aksesibilitas transportasi darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis.

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan adalah untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal. Di lokasi tersebut pula tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 telah terealisasi sebanyak Rp. 5.582.922.393,- dari total pagu sebesar Rp. 5.583.575.000,- atau sebesar 99,99 %.

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2021 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui pemberian subsidi bagi angkutan perintis yang melayani masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal. Kami juga terus berupaya menyediakan atau memberikan subsidi tersebut di daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat senantiasa membantu peningkatan ekonomi dan pembangunan serta mewujudkan masyarakat Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin.

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Realisasi kinerja presentase pelaksanaan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

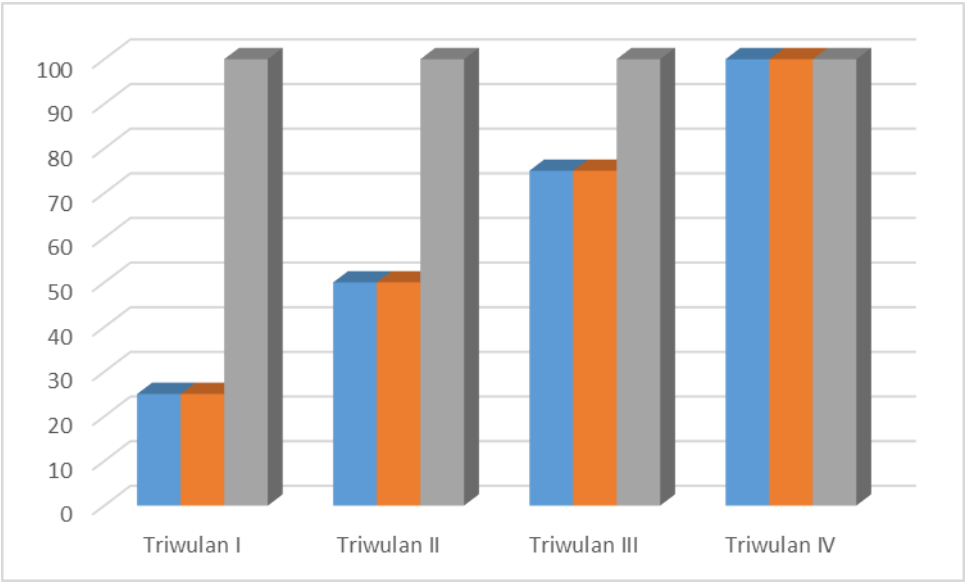
Tabel III.1 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
IKK.1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	-	-	-	100%	100%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

IKK.1.6	Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	-	-	-	
---------	---	------	------	------	---	---	---	--

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Realisasi kinerja presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.2 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	25	50	75	100
REALISASI	25	50	75	100
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.2. Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Internasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara

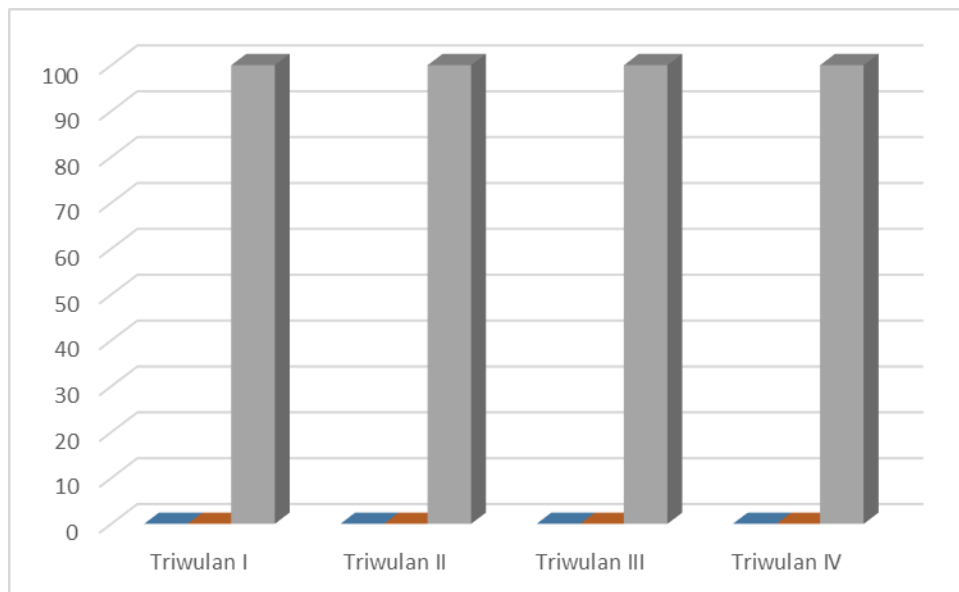
NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan pelayanan subsidi angkutan antarmoda di sejumlah simpul transportasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

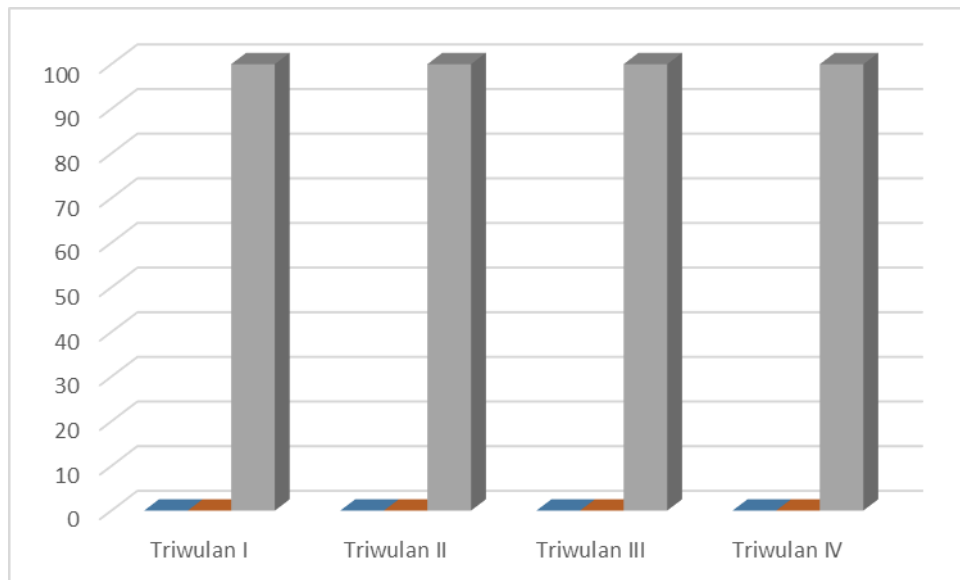
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
IKK.1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.4 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

A.3.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

Terminal tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

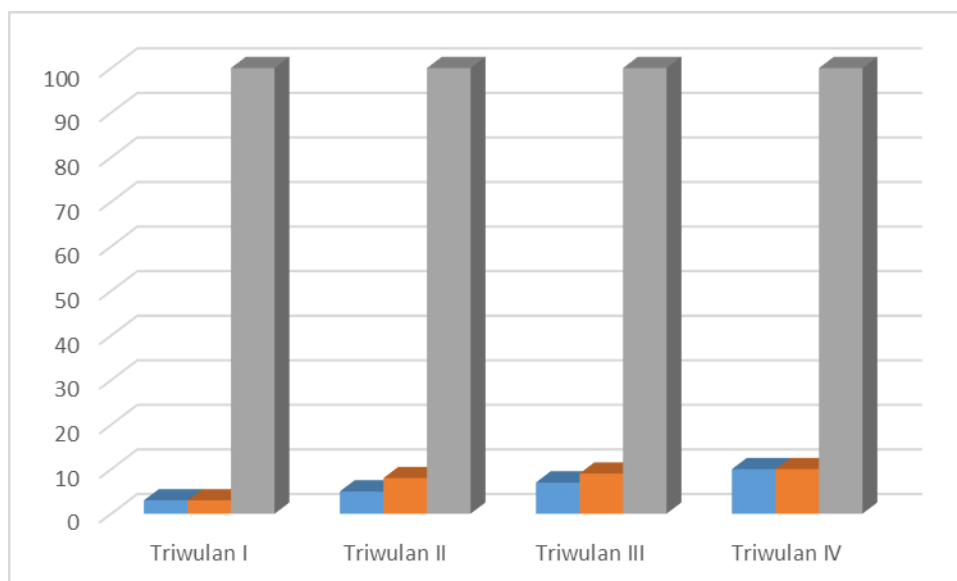
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 sebanyak 10 Lokasi dengan presentase sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebanyak 10 Lokasi dengan presentase sebesar 100%, maka capaian kinerja

mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.5. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	3	5	7	10
REALISASI 	3	8	9	10
CAPAIAN 	100%	160%	129%	100%

A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2021 didukung dengan kegiatan operasional layanan Terminal Tipe A yang melayani para penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Perdesaan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 yaitu 10 lokasi atau sebesar 100%.

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 telah terealisasi sebanyak Rp. 5.582.922.393,- dari total pagu sebesar Rp. 5.583.575.000,- atau sebesar 99,99 %.

A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Terminal Tipe A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

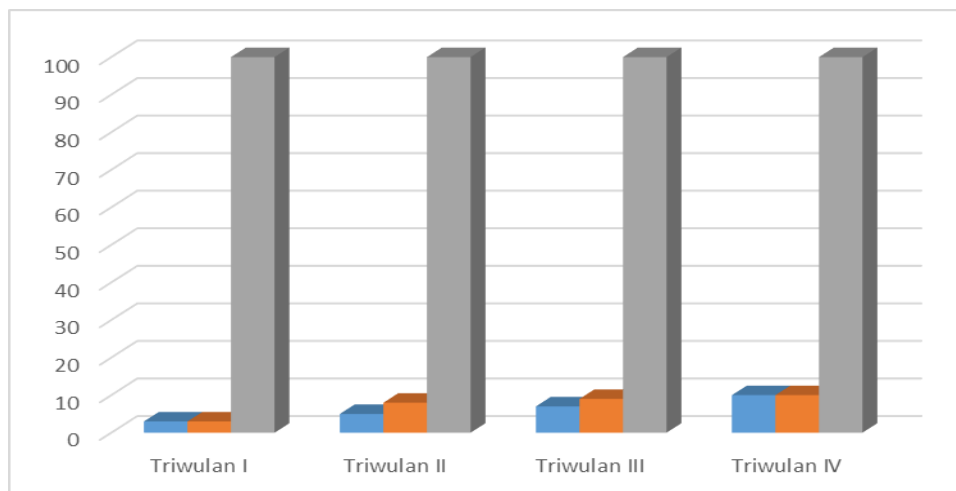
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 sebanyak 10 Lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2020 yang tidak terdapat target kinerja mengenai Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
IKK.1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	-	-	100%	10	10	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2021 sebanyak 10 lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebanyak 10 lokasi atau sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.6 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	3	5	7	10
REALISASI 	3	8	9	10
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.4. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

A.4.1. Definisi Indikator Kinerja

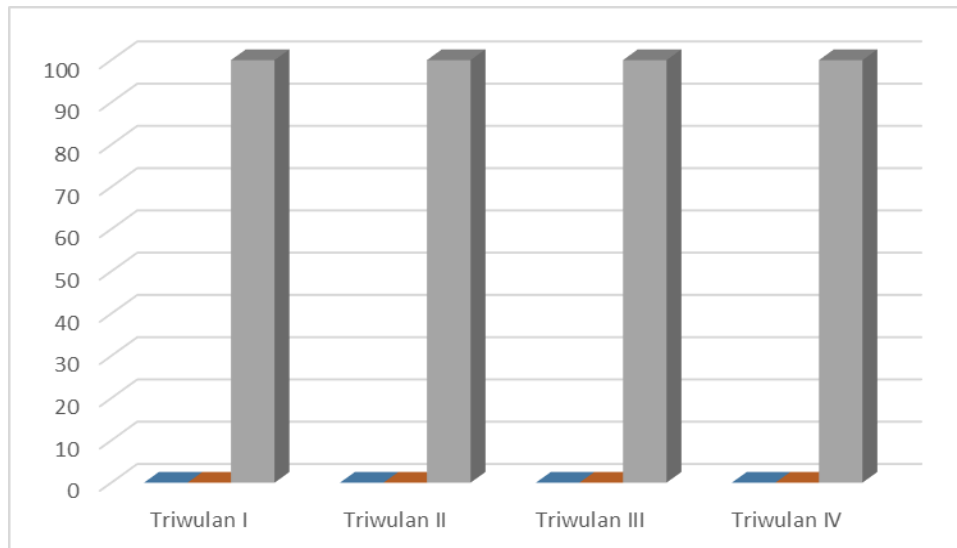
Fasilitas Pendukung dan integrasi moda yang terbangun. Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda}$$

A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.7. Grafik Capaian IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

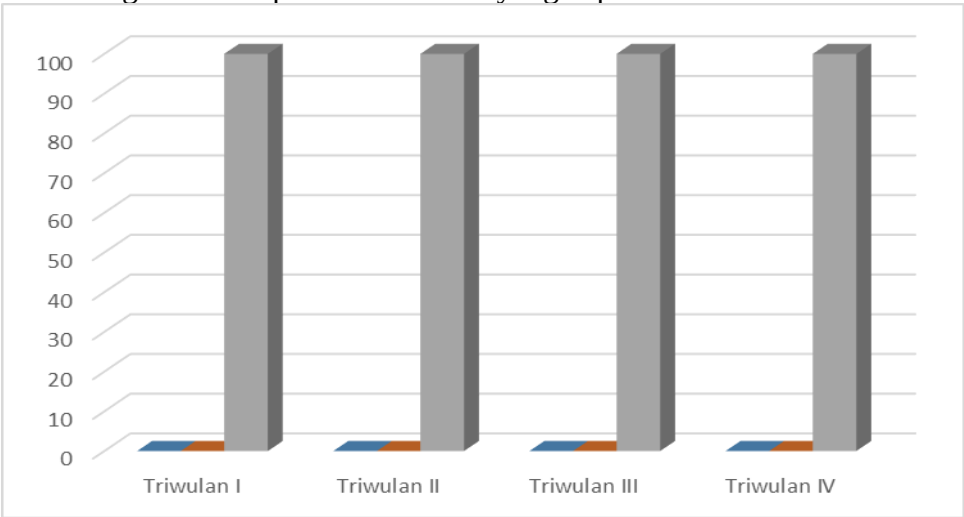
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
IKK.1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.8 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

A.5. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

A.5.1. Definisi Indikator Kinerja

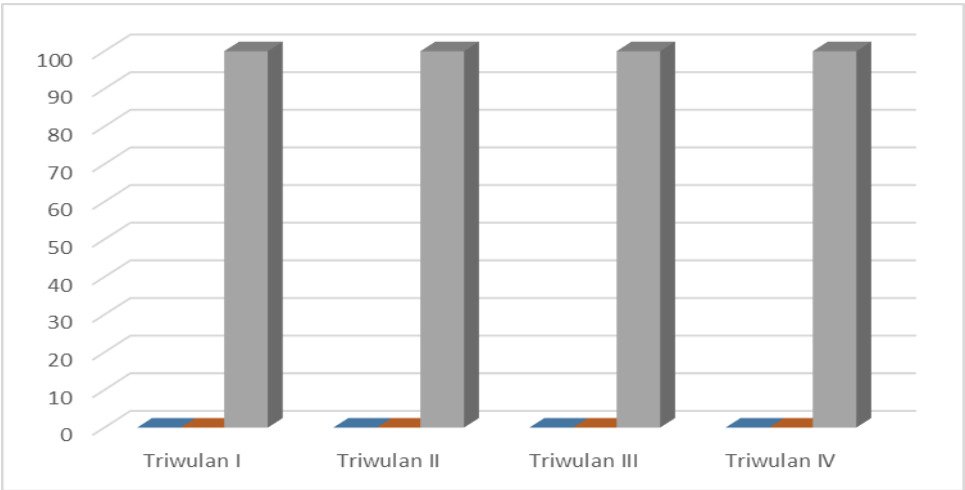
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

A.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.9. Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

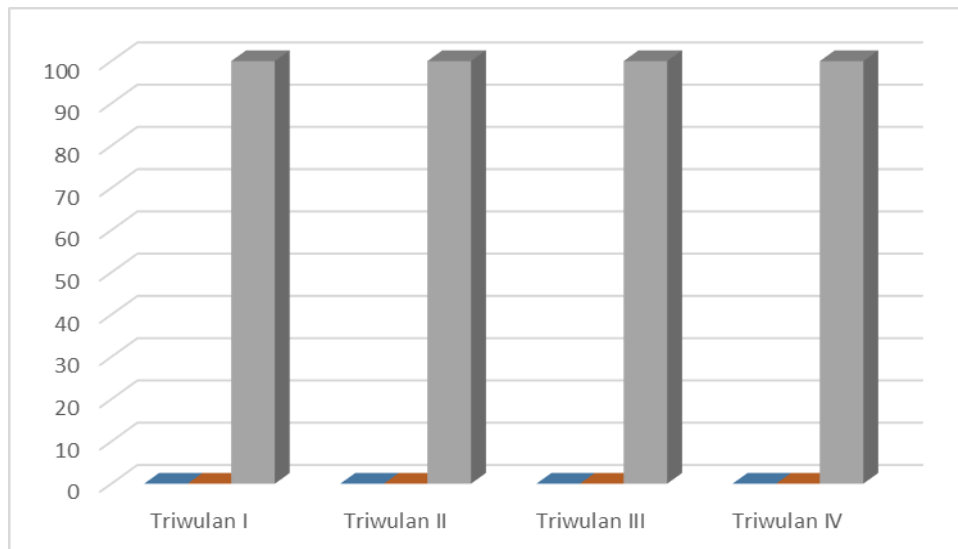
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
IKK.1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

A.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.10 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.6. Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

A.6.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

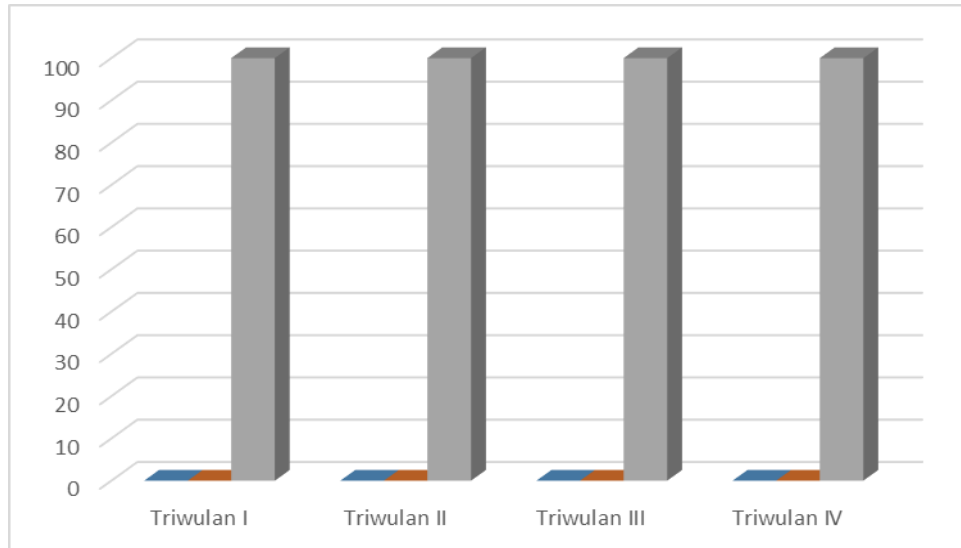
Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)}$$

A.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.11. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

A.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

A.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

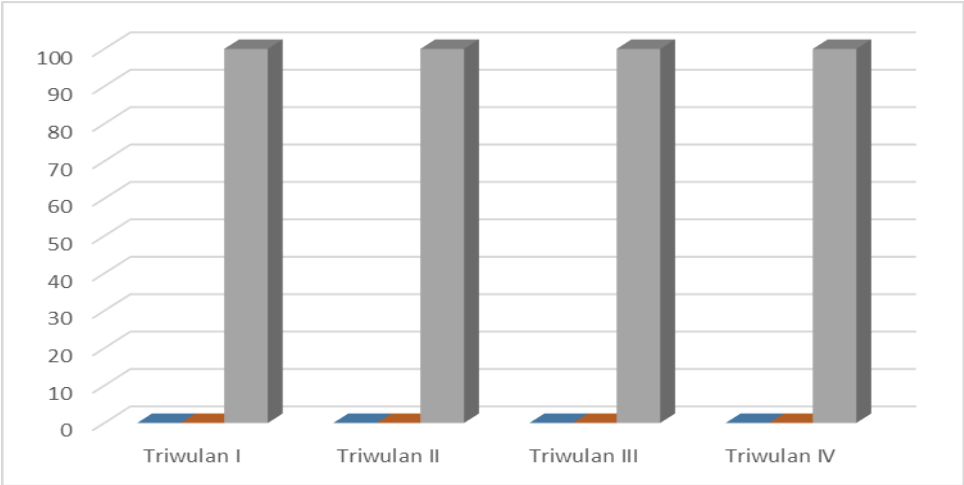
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi									
IKK.1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan	

A.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.12 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100	100%	100%

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 2.1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A;
2. IKK 2.2. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A;
3. IKK 2.3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP.

B.1. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

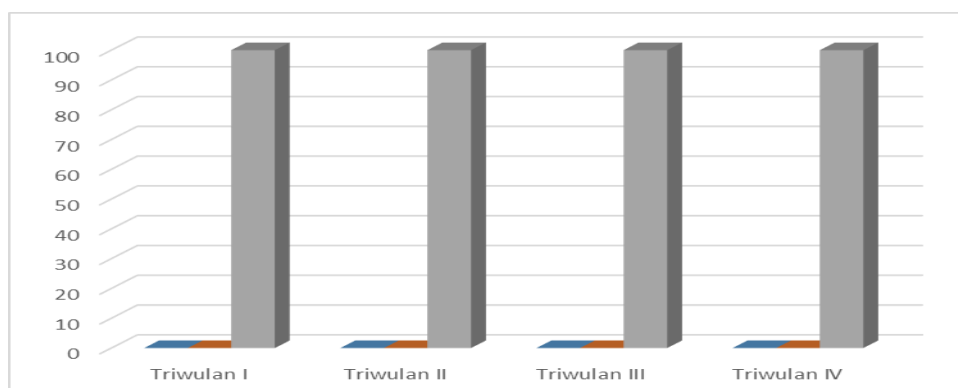
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.13. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A di wilayah Provinsi Jawa Barat.

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

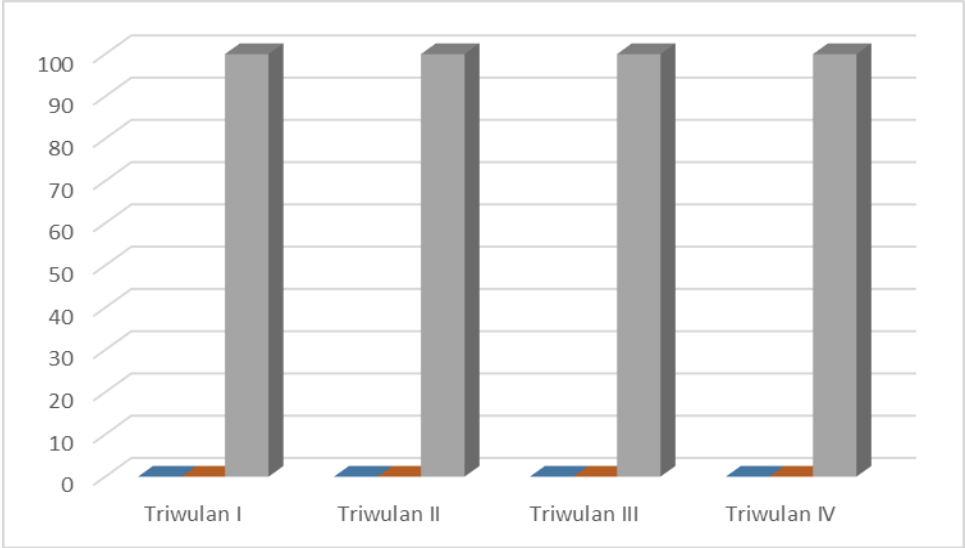
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat									
IKK.2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	-	-	100%	-	-	100%	Tetap	

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.14 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

B.2. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.

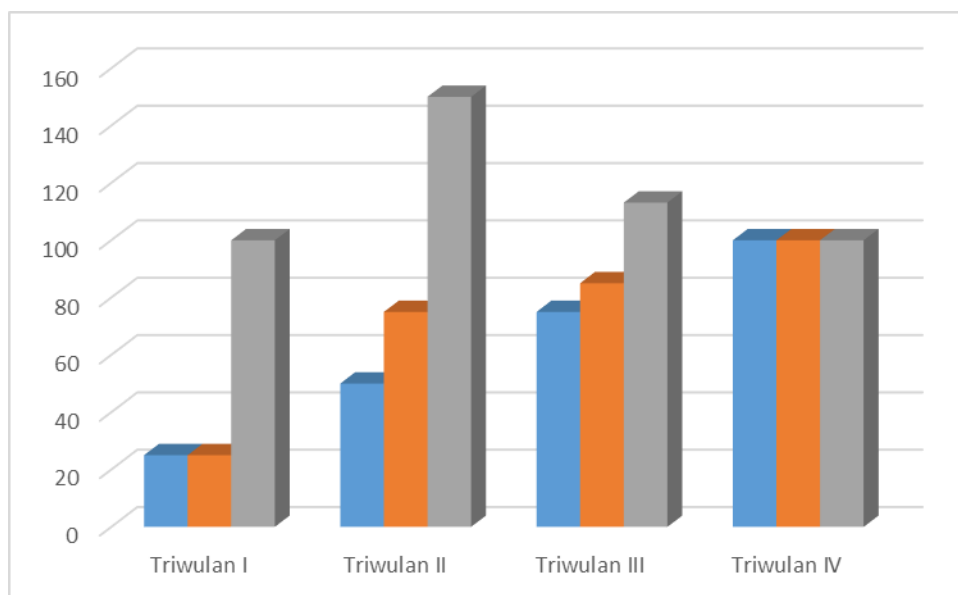
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasionalnya secara online}}{\text{Jumlah Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$= (\text{Presentase TTA Online} \times 50 \%) + (\text{Presentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal})$$

B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.15. Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	25	50	75	100
REALISASI 	25	75	85	100
CAPAIAN 	100%	150%	113,13%	100%

B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2021 didukung dengan kegiatan Pembiayaan Operasional Terminal Tipe A yang dikelola, Pelayanan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis internet dan penerapan pelayanan berbasis teknologi).

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebanyak Rp. 50.390.598.708,- dari total pagu sebesar Rp. 50.405.870.000,- atau sebesar 99,97 %.

B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2021 yang menunjukan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A melalui Pembiayaan Operasional Terminal Tipe A yang dikelola, Pelayanan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis internet dan penerapan pelayanan berbasis teknologi) di tahun-tahun yang akan datang.

B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

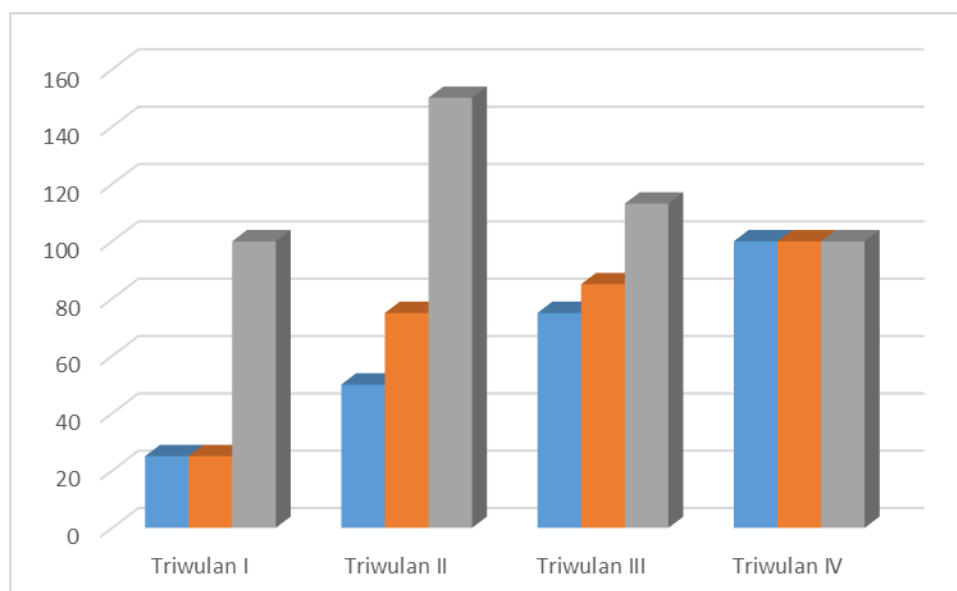
Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat								
IKK.2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	-	-	-	100%	100%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK.1.1	Penyusunan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan, Penyelenggaraan Dan Pengawasan Terminal Penumpang Tipe A, Smart Terminal	100%	100%	100%	-	-	-	

B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.16 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	25	50	75	100
REALISASI 	25	75	85	100
CAPAIAN 	100%	150%	113,13%	100%

B.3. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

B.3.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

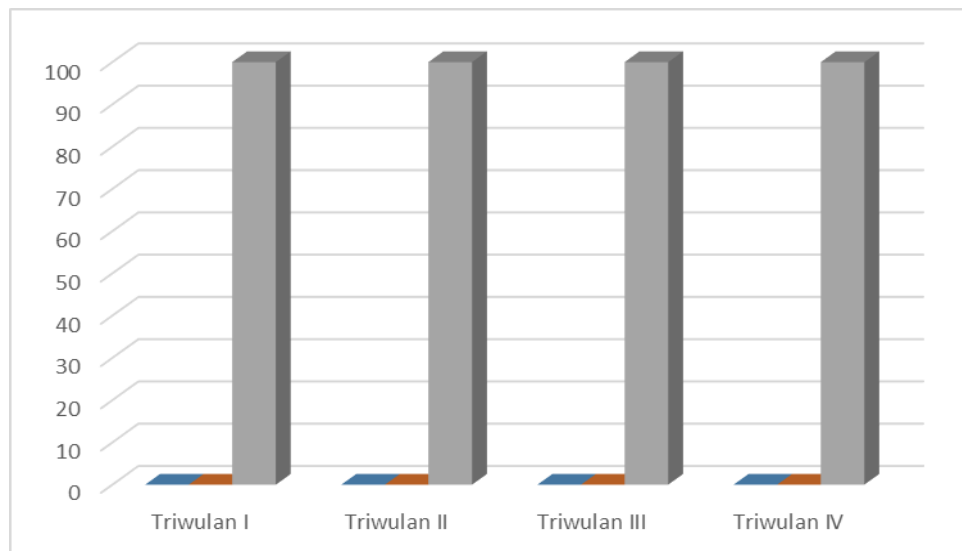
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.17. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP wilayah Provinsi Jawa Barat.

B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga

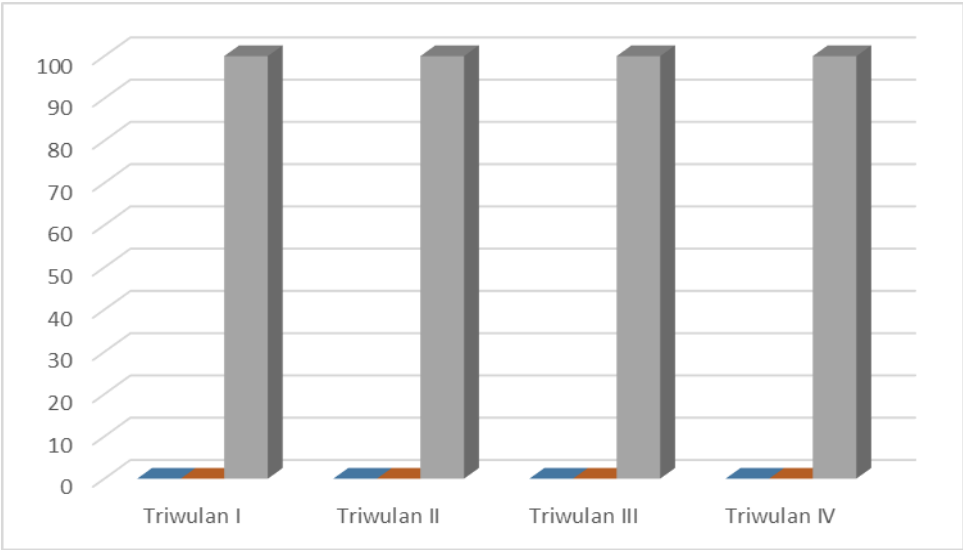
capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat								
IKK.2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP namun capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.18 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 3.1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.3. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan;
4. IKK 3.4. Jumlah ketersediaan taman edukatif;
5. IKK 3.5. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
6. IKK 3.6. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*;
7. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

C.1. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

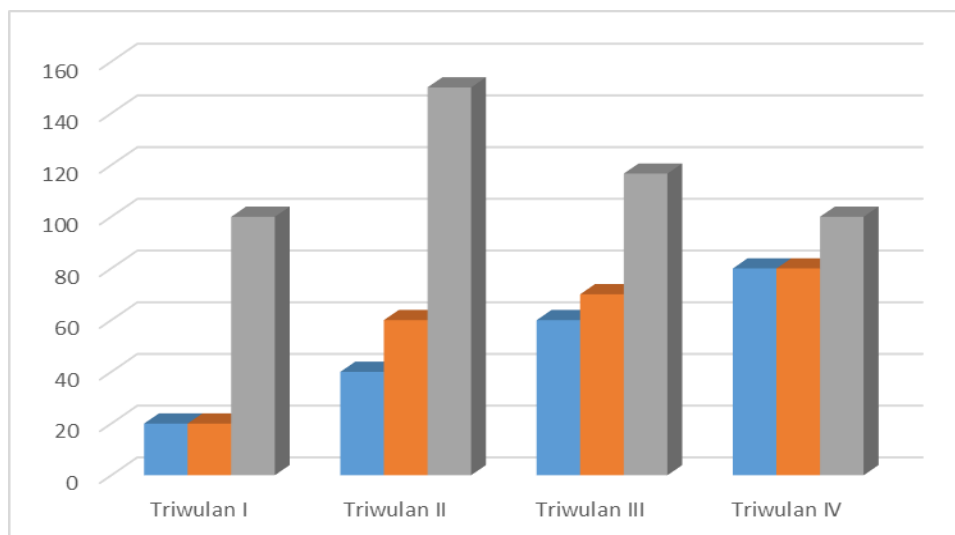
1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Tahun 2021}}{\text{Presentase Perlengkapan Jalan sesuai kondisi ideal pada Tahun 2021}} \times 100\%$$

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2021 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.19. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	20	40	60	80
REALISASI 	20	60	70	80
CAPAIAN 	100%	150%	116,67%	100%

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja

Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2021 didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya bantuan teknis perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dengan penggunaan tenaga kerja menggunakan skema tenaga pendukung padat karya, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* dapat terbantu (Pemulihan Ekonomi Nasional).
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat berdampak pada terwujudnya penguatan penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ.
3. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dengan penggunaan tenaga kerja menggunakan skema tenaga pendukung padat karya, sehingga masyarakat di wilayah tersebut yang terdampak pandemi *Covid-19* dapat terbantu (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{80\%}{80\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebanyak Rp. 101.459.168.045,- dari total pagu sebesar Rp. 101.569.964.000,- atau sebesar 99,89 %.

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2021 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal melalui kegiatan bantuan teknis perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ di tahun-tahun yang akan datang.

C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

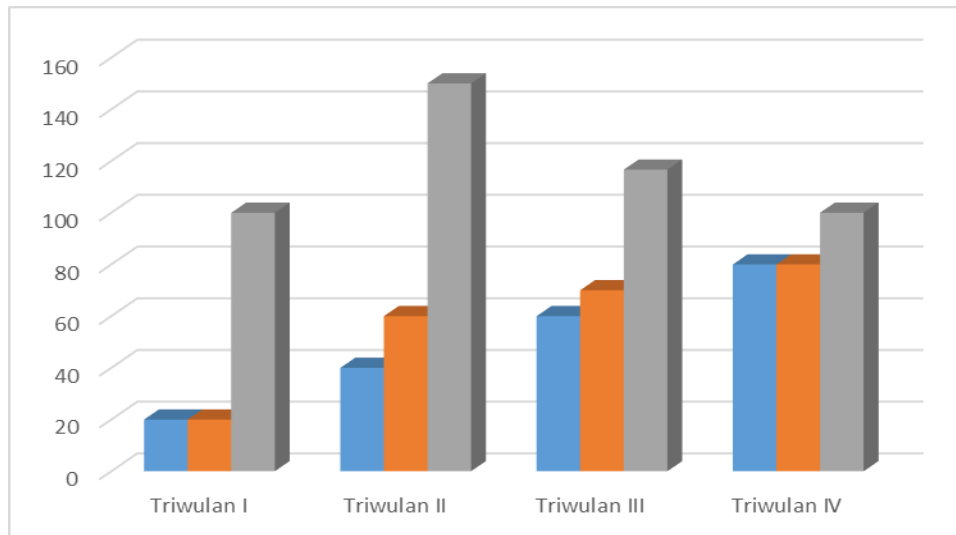
Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2021 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara presentase. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	-	-	-	80%	80%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK.4 dan 5	Tersusunnya pengelolaan, pengawasan,penyelenggaraan, pemeliharaan,dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Penyusunan Bahan Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	100%	100%	-	-	-	

C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2021 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.20 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	20	40	60	80
REALISASI 	20	60	70	80
CAPAIAN 	100%	150%	116,67%	100%

C.2. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

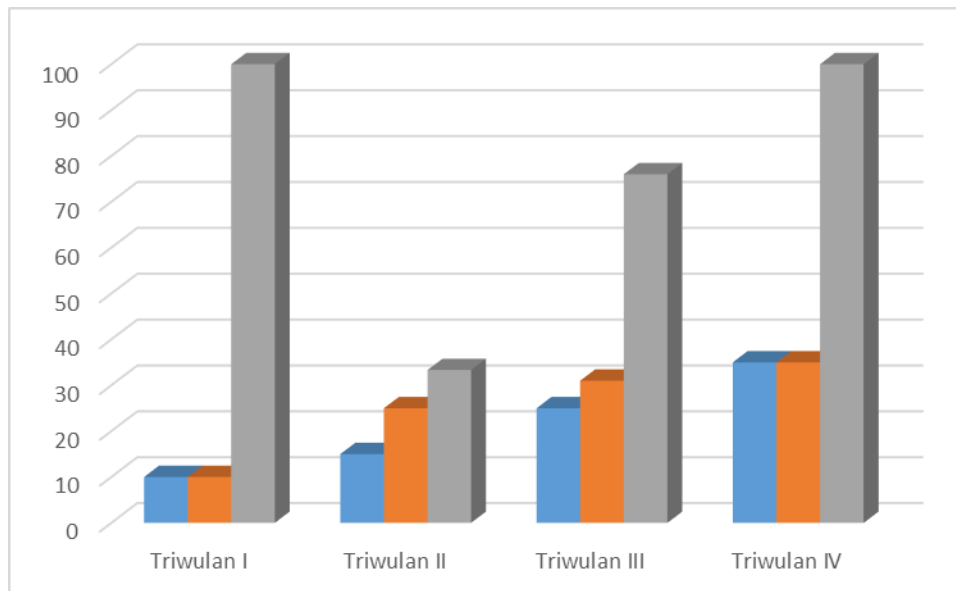
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran pada UPPKB di BPTD Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2021}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk pada UPPKB di BPTD Wilayah IX Jawa Barat Tahun 2021}} \times 100\%$$

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 35%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.21. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	10	15	25	35
REALISASI 	10	25	31	35
CAPAIAN 	100%	33,33%	76%	100%

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kendaraan yang memasuki area UPPKB masih relatif tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{35\%}{35\%} \times 100\%$$

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 yang menunjukan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hingga penindakan hukum terhadap kendaraan barang yang masuk ke UPPKB tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menurunkan persentase pelanggaran di tahun-tahun yang akan datang.

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

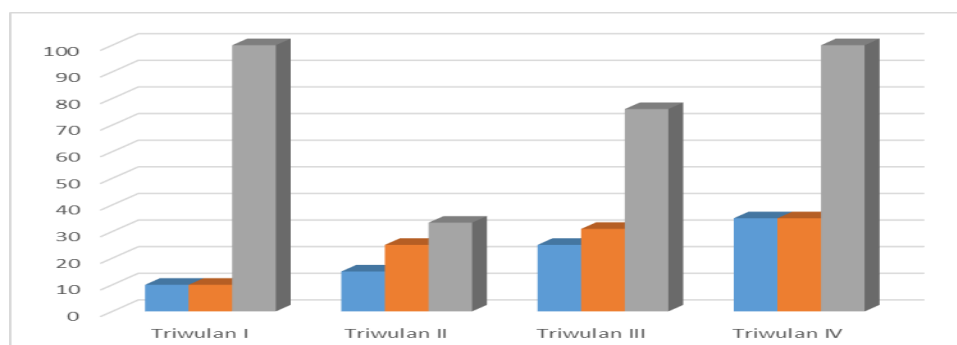
Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang Tahun 2021 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini tidak mempunyai perbandingan dikarenakan terdapat perubahan indikator (indikator kinerja baru) sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	-	-	-	80%	80%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja presentase Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.22 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	10	15	25	35
REALISASI 	10	25	31	35
CAPAIAN 	100%	33,33%	76%	100%

C.3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan

C.3.1. Definisi Indikator Kinerja

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

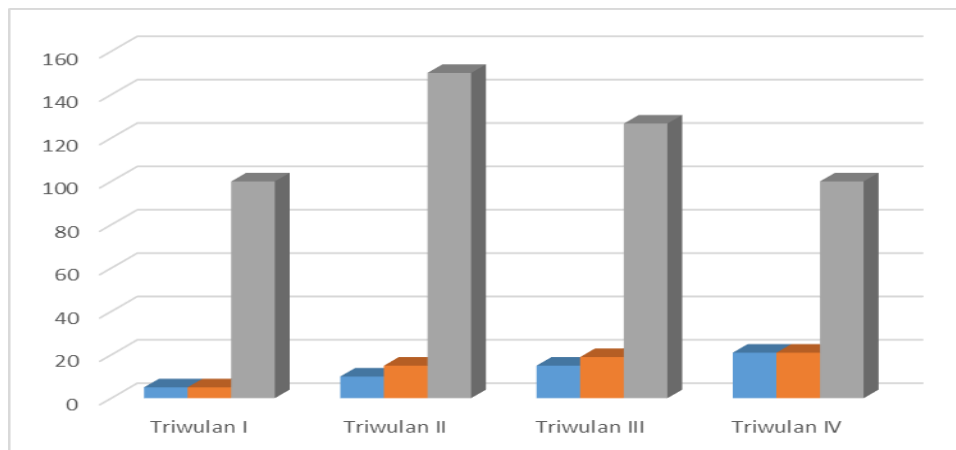
Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)

C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun 2021 sebanyak 21 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebanyak 21 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.23. Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	5	10	15	21
REALISASI 	5	15	19	21
CAPAIAN 	100%	150%	126,67%	100%

C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian sebesar 100%.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{21}{21} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebanyak Rp. 101.459.168.045,- dari total pagu sebesar Rp. 101.569.964.000,- atau sebesar 99,89 %.

C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2021 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan penyediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan Tahun Anggaran 2021 melalui kegiatan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di sejumlah titik lokasi di wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema

manajemen keselamatan LLAJ berupa penyediaan kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya.

C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

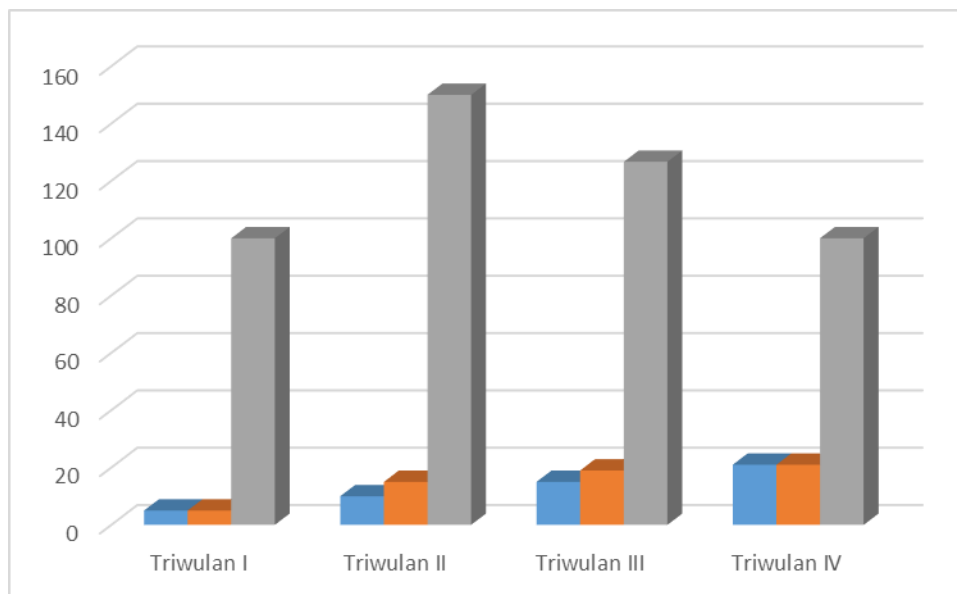
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan sebanyak 21 Lokasi atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebanyak 21 Lokasi atau sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2021 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 100%, namun secara jumlah lokasi lebih banyak 1 (satu) lokasi dibanding dengan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.3	Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	-	-	-	21	21	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan
IKK.7	Jumlah lokasi Pembangunan ZoSS	20	20	100%	-	-	-	

C.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra BPTD Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan Tahun 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 dalam rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.24 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	5	10	15	21
REALISASI 	5	15	19	21
CAPAIAN 	100%	150%	126,67%	100%

C.4. Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

C.4.1. Definisi Indikator Kinerja

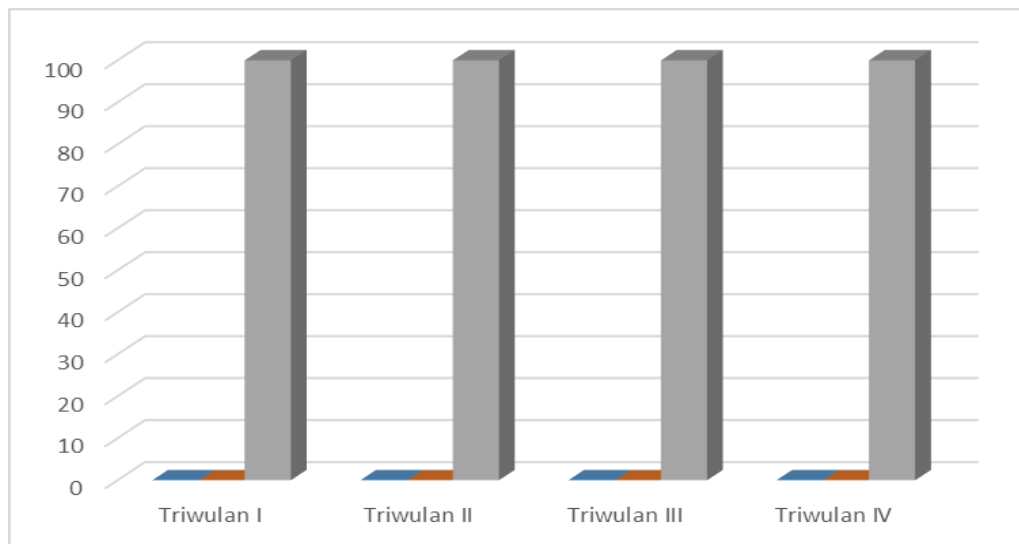
Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniature prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang display fasilitas dan tata cara lalu lintas jalan, kereta api dan angkutan sungai danau. Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Kumulatif taman edukasi yang sudah terbangun s.d tahun (n)

C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan jumlah ketersediaan taman edukatif maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.25. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan taman edukatif.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

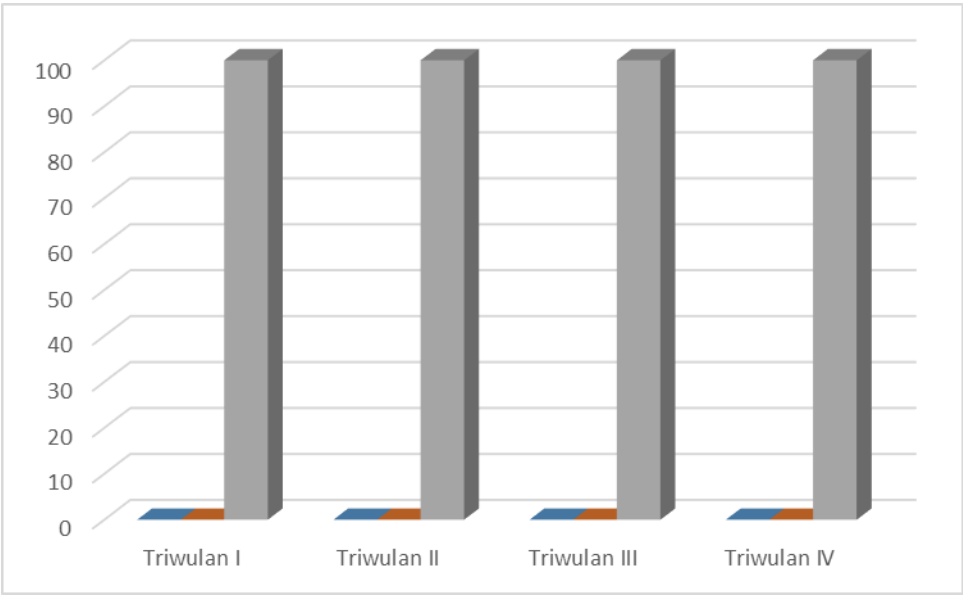
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.26 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.5. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

C.5.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

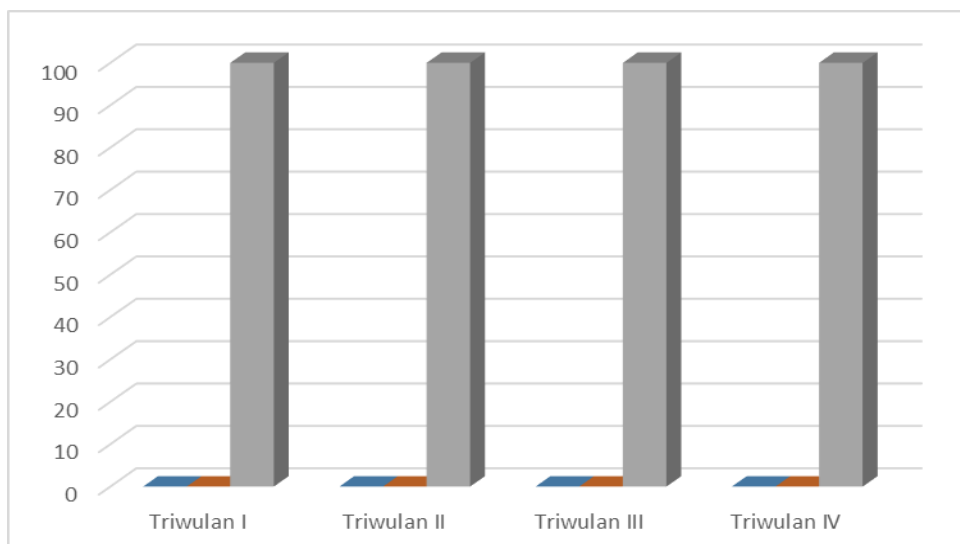
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$$

C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.27. Grafik Capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang keselamatan jalan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

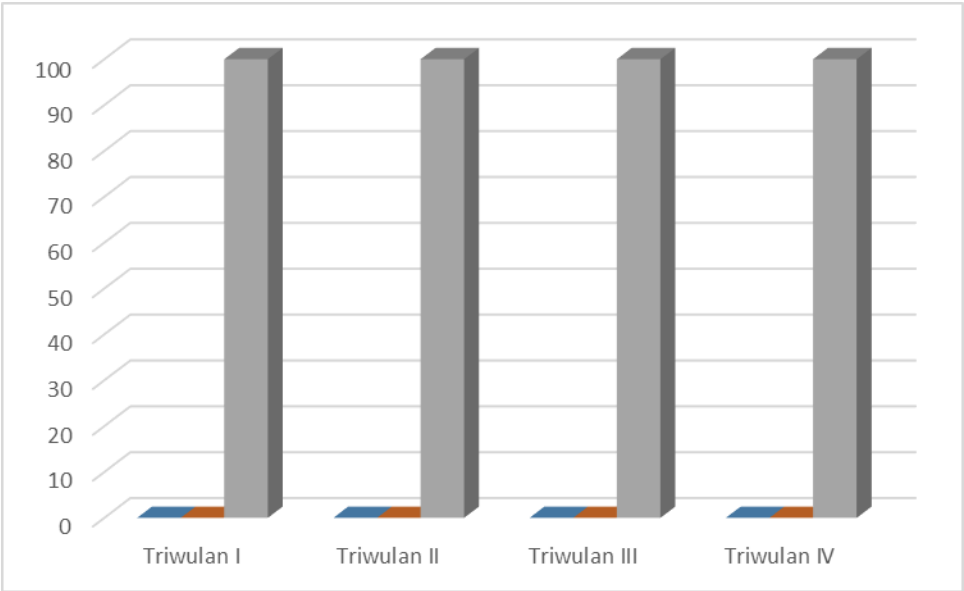
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan	-	-	100%	-	-	100%	Tetap

C.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.28 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

C.6. Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

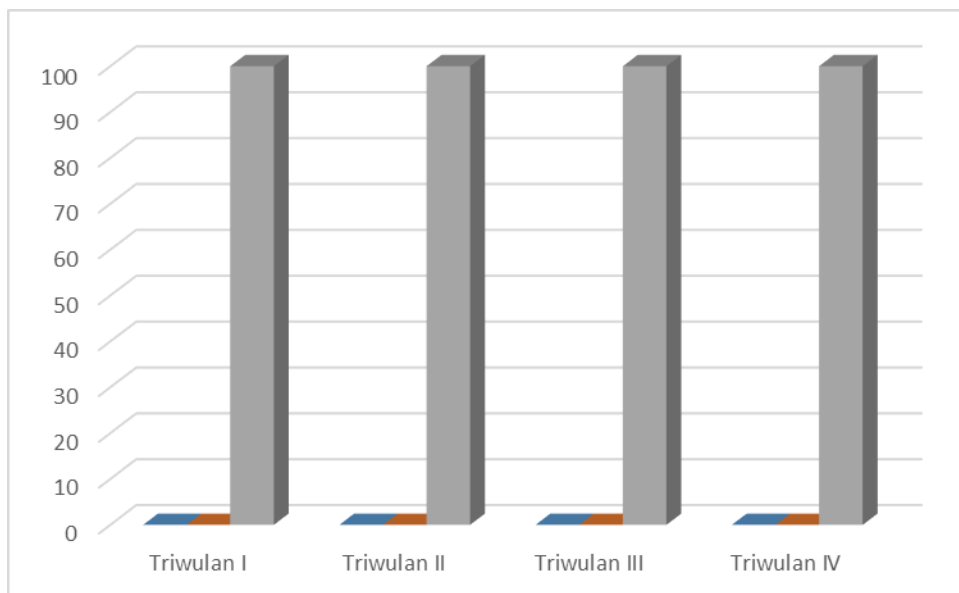
C.6.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan} \\ \text{Bermotor yang sesuai standar} \\ \text{Internasional di wilayah BPTD IX} \\ \text{Jawa Barat Tahun 2021} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan} \\ \text{Bermotor di wilayah BPTD IX Jawa} \\ \text{Barat Tahun 2021} \end{array}} \times 100\%$$

C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.29. Grafik Capaian IKK Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

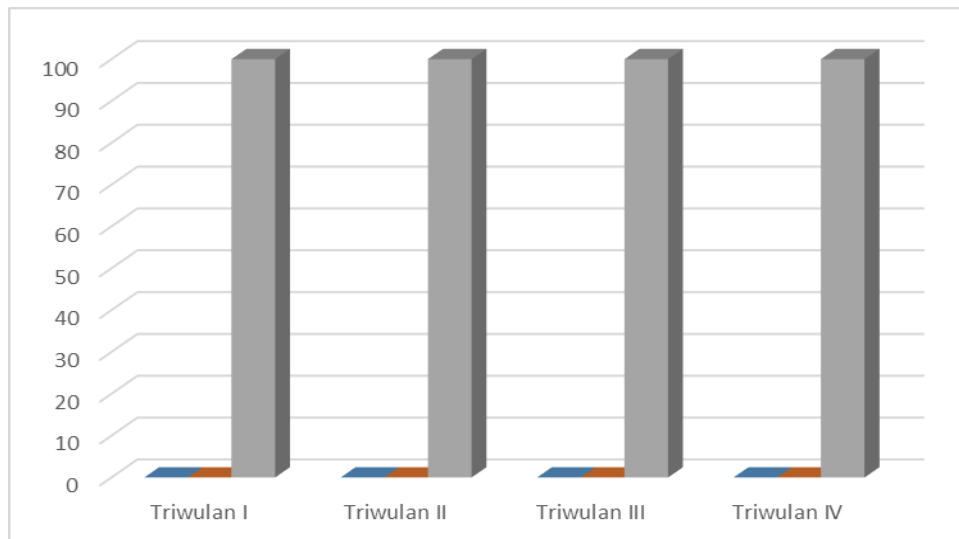
Tabel III.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitas pengujian

kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.30 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.7. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

C.7.1. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

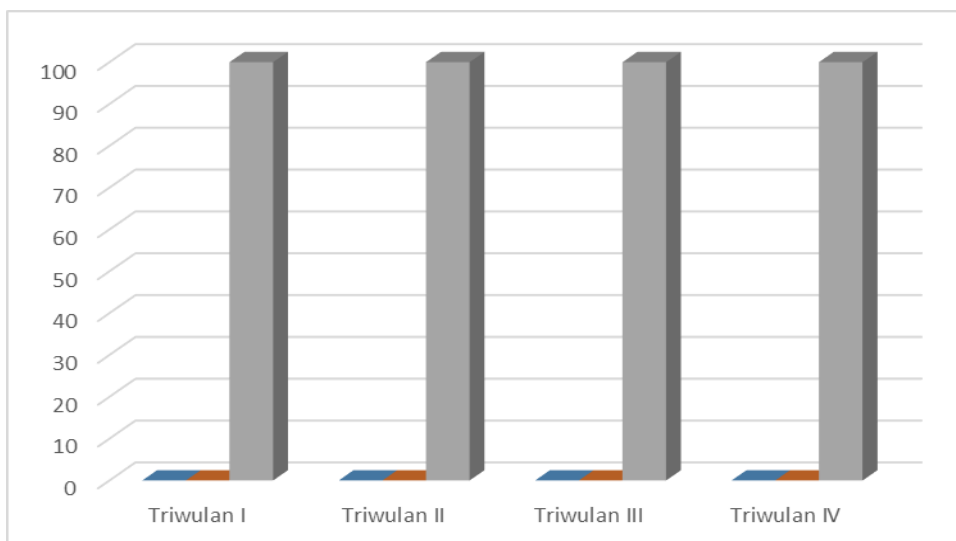
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda DKI Jakarta, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun n}}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta+Kota+Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

C.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.31. Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

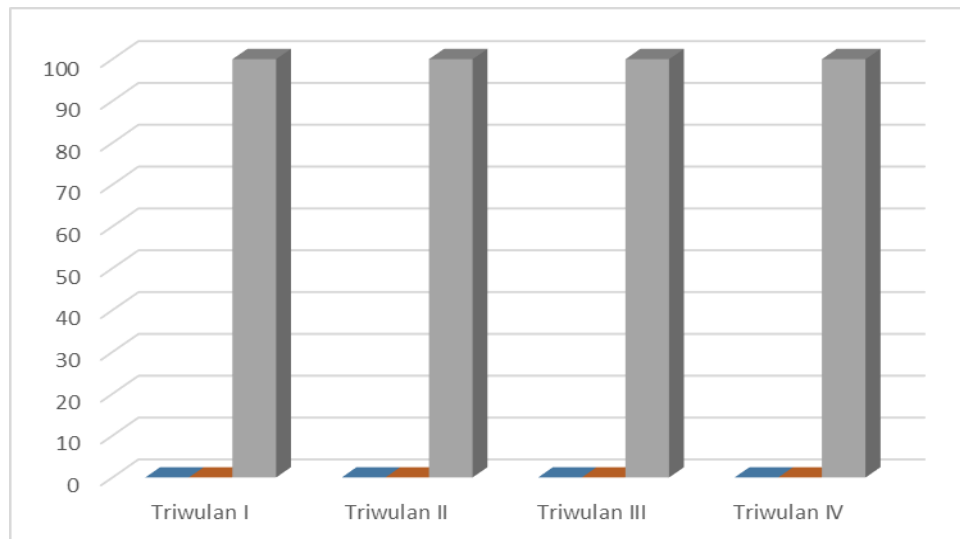
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.7.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.32 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.8. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

C.8.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

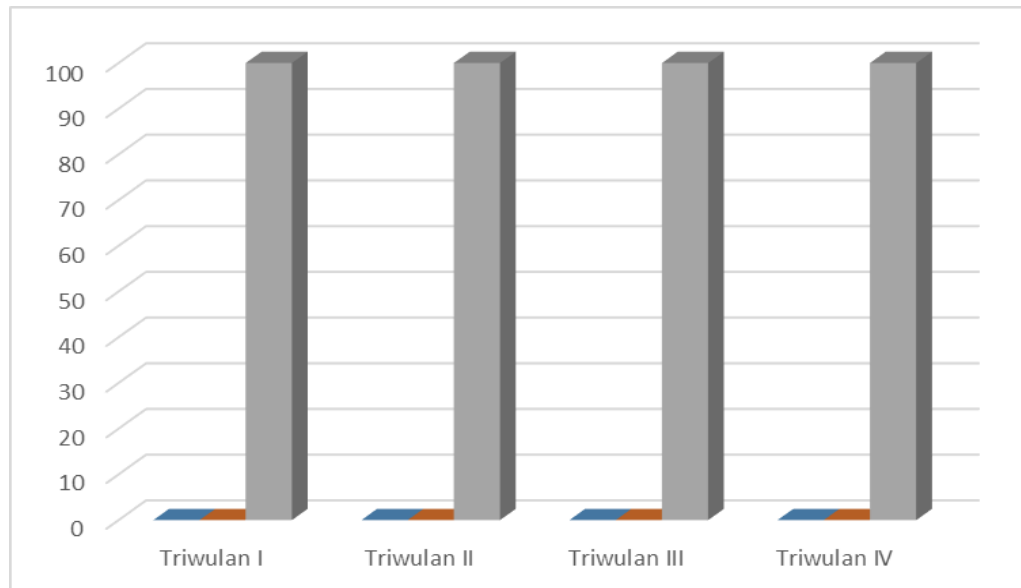
Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun}}{\text{Jumlah fasilitas keselamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

C.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.33. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

C.8.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

C.8.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan penyediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP di wilayah Provinsi Jawa Barat.

C.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

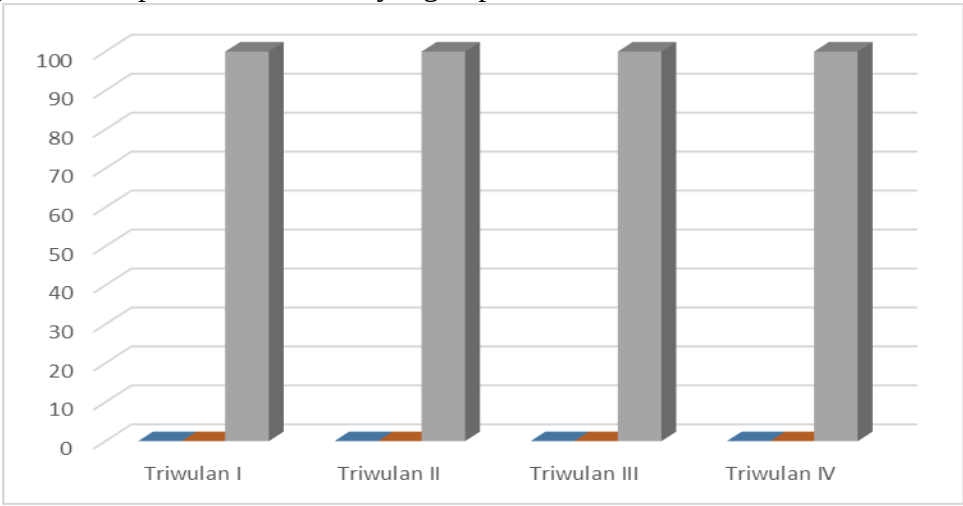
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	-	-	100%	-	-	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan

C.8.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.34 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

D. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 3.1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

D.1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepgawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

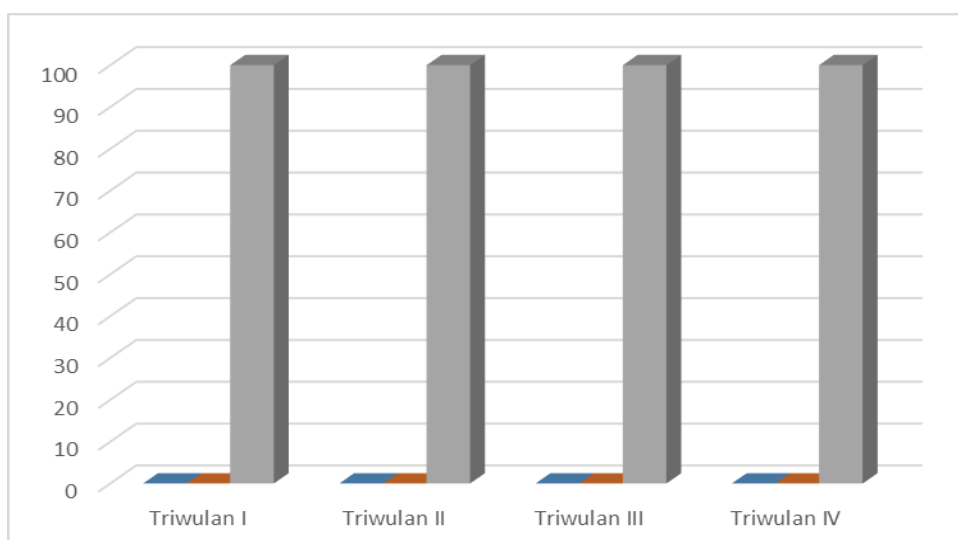
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.35. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	0	0	0	0
REALISASI 	0	0	0	0
CAPAIAN 	100%	100%	100%	100%

D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2021 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Pada Tahun 2021 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat, namun BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

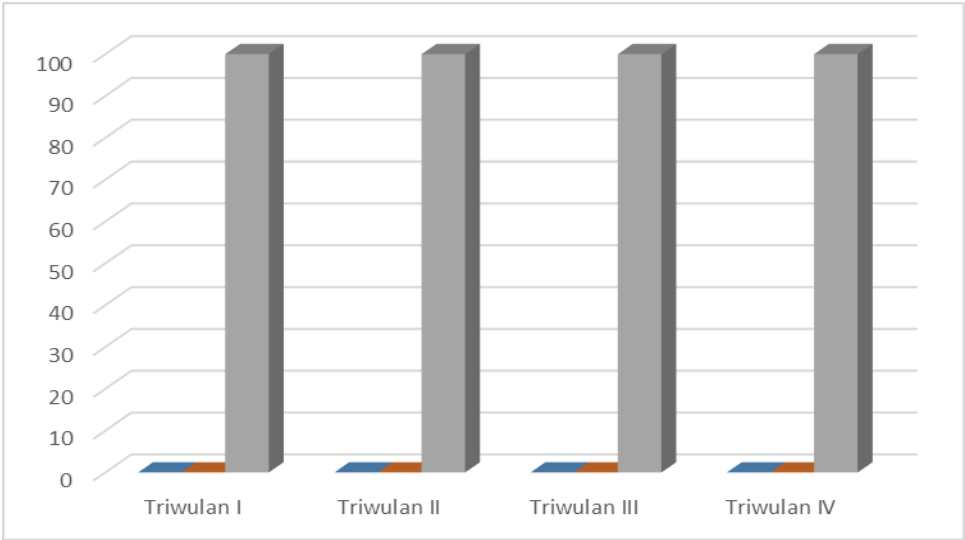
Tidak terdapat realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat baik pada Tahun 2020 maupun 2021, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
IKK.5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	-	-	100%	-	-	100%	Tetap

D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 pada Renstra BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Pada dokumen revisi rencana strategis BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat 2020-2024 tidak terdapat target kinerja pada Tahun 2021 atas indikator kinerja kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.36 yang dapat dilihat di bawah ini:



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET	0	0	0	0
REALISASI	0	0	0	0
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%

III.3 REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

- Pagu Anggaran Awal Tahun 2021 Posisi 1 Januari 2021 sebesar Rp. 167.696.923.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	151.797.523.000,-
PNBP	:	Rp.	15.899.400.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	-,-
TOTAL	:	Rp.	167.696.923.000,-
 - Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	36.119.072.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	67.286.287.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	64.291.564.000,-
Total	:	Rp.	167.696.923.000,-

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat TA. 2021 akibat adanya penambahan anggaran pada Revisi DIPA sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar **Rp. 35.044.969.000,-** sehingga total pagu akhir DIPA BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 202.741.892.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	168.370.019.000,-
PNBP	:	Rp.	18.195.440.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	16.176.433.000,-
TOTAL	:	Rp.	202.741.892.000,-

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	31.304.865.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	69.427.395.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	102.009.632.000,-
Total	:	Rp.	202.741.892.000,-

- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-1);
- Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Nomor S-874/WPB.13/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-02 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2);
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-290/AG/AG.3/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-4);
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-316/AG/AG.3/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran 999.08 ke BA 022.03 (Kemenhub c.q. Ditjen Phb Darat) TA. 2021 (Revisi ke-5);
- Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Nomor S-1604/WPB.13/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-06 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-6);
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-443/AG/AG.3/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-7);

- g. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-532/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Refocusing dan Realokasi Belanja (Tahap III) Tahun 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-8);
- h. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-888/AG/AG.3/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-13);
- i. Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Nomor S-3845/WPB.13/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-14 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-14);
- j. Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Nomor S-3994/WPB.13/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-15 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-15);
- k. Surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Nomor S-4561/WPB.13/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Pemutakhiran Data POK Revisi ke-16 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-16).
- l.
 - Refocusing Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan DIPA Revisi ke-16 yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2021, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada BPTD Wilayah IX Jawa Barat sebesar Rp. 14.377.867.000,-. Dari pagu Revisi ke-9 sebesar Rp. 188.364.025.000,- menjadi sebesar Rp. 202.741.892.000,- di Revisi ke-16.

• Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021

NO	KETERANGAN	RM	PNBP	SBSN	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagu Awal	151.797.523.000	15.899.400.000	-	167.696.923.000
2.	Revisi ke-01	115.548.508.000	15.899.400.000	-	131.447.908.000
3.	Revisi ke-02	115.548.508.000	15.899.400.000	-	131.447.908.000
4.	Revisi ke-03	115.548.508.000	15.899.400.000	1.276.433.000	132.724.341.000
5.	Revisi ke-04	173.084.194.000	15.899.400.000	1.276.433.000	190.260.027.000
6.	Revisi ke-05	170.154.597.000	15.899.400.000	1.276.433.000	187.330.430.000
7.	Revisi ke-06	170.154.597.000	15.899.400.000	1.276.433.000	187.330.430.000
8.	Revisi ke-07	170.154.597.000	17.589.200.000	1.276.433.000	189.020.230.000
9.	Revisi ke-08	170.033.002.000	17.589.200.000	1.276.433.000	188.898.635.000
10.	Revisi ke-09	169.498.392.000	17.589.200.000	1.276.433.000	188.364.025.000
11.	Revisi ke-10	169.498.392.000	17.589.200.000	16.176.433.000	203.264.025.000
12.	Revisi ke-11	170.042.218.000	18.195.440.000	16.176.433.000	204.414.091.000
13.	Revisi ke-12	171.194.524.000	18.195.440.000	16.176.433.000	205.566.397.000
14.	Revisi ke-13	168.370.019.000	18.195.440.000	16.176.433.000	202.741.892.000
15.	Revisi ke-14	168.370.019.000	18.195.440.000	16.176.433.000	202.741.892.000
16.	Revisi ke-15	168.370.019.000	18.195.440.000	16.176.433.000	202.741.892.000
17.	Revisi ke-16	168.370.019.000	18.195.440.000	16.176.433.000	202.741.892.000

Sumber : Layanan SatuDJA

- Rincian Revisi Per Jenis Belanja

NO	KETERANGAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagu Awal	36.119.072.000	67.286.287.000	64.291.564.000	167.696.923.000
2.	Revisi ke-01	36.119.072.000	54.781.908.000	40.546.928.000	131.447.908.000
3.	Revisi ke-02	36.119.072.000	54.781.908.000	40.546.928.000	131.447.908.000
4.	Revisi ke-03	36.119.072.000	54.781.908.000	41.823.361.000	132.724.341.000
5.	Revisi ke-04	36.119.072.000	65.796.194.000	88.344.761.000	190.260.027.000
6.	Revisi ke-05	33.189.475.000	65.796.194.000	88.344.761.000	187.330.430.000
7.	Revisi ke-06	33.189.475.000	67.446.194.000	86.694.761.000	187.330.430.000
8.	Revisi ke-07	33.189.475.000	67.446.194.000	86.694.761.000	189.020.230.000
9.	Revisi ke-08	33.189.475.000	67.324.599.000	88.384.561.000	188.898.635.000
10.	Revisi ke-09	32.654.865.000	67.324.599.000	88.384.561.000	188.364.025.000
11.	Revisi ke-10	32.654.865.000	67.324.599.000	103.284.561.000	203.264.025.000
12.	Revisi ke-11	32.654.865.000	67.324.599.000	103.284.561.000	204.414.091.000
13.	Revisi ke-12	32.654.865.000	68.429.981.000	104.481.551.000	205.566.397.000
14.	Revisi ke-13	32.654.865.000	68.077.395.000	102.009.632.000	202.741.892.000
15.	Revisi ke-14	32.304.865.000	68.427.395.000	102.009.632.000	202.741.892.000
16.	Revisi ke-15	31.304.865.000	69.427.395.000	102.009.632.000	202.741.892.000
17.	Revisi ke-16	31.304.865.000	69.427.395.000	102.009.632.000	202.741.892.000

Sumber : Layanan SatuDJA

- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TA. 2021
Belanja Pegawai	Rp. 36.119.072.000,-	(Rp. 4.814.207.000)	Rp. 31.304.865.000,-
Belanja Barang	Rp. 67.286.287.000,-	Rp. 2.141.108.000,-	Rp. 69.427.395.000,-
· RM	Rp. 61.386.887.000,-	Rp. 1.436.868.000,-	Rp. 62.823.755.000,-
· PNPB	Rp. 5.899.400.000,-	Rp. 704.240.000,-	Rp. 6.603.640.000,-
Belanja Modal	Rp. 64.291.564.000,-	Rp. 37.718.068.000,-	Rp. 102.009.632.000,-
· RM	Rp. 54.291.564.000,-	Rp. 19.949.835.000,-	Rp. 74.241.399.000,-
· PNPB	Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 1.591.800.000,-	Rp. 11.591.800.000,-
· SBSN	-	Rp. 16.176.433.000,-	Rp. 16.176.433.000,-
TOTAL	Rp. 167.696.923.000,-	Rp. 35.044.969.000,-	Rp. 202.741.892.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

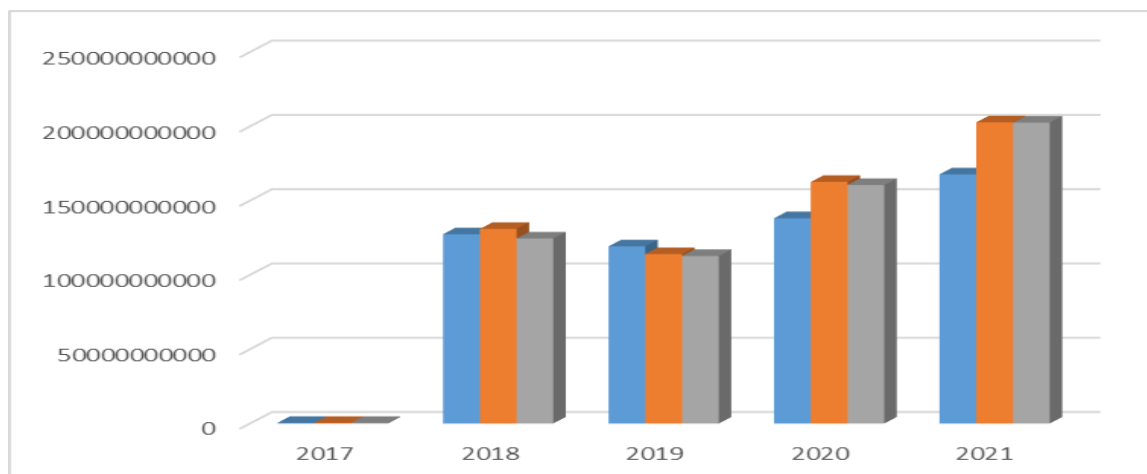
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW I	Pagu TW II	Pagu TW III	Pagu Akhir
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	6.036.848.000	5.946.269.000	5.946.269.000	5.926.269.000	5.583.575.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	34.757.437.000	33.377.437.000	34.653.870.000	49.553.870.000	50.405.870.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	77.945.629.000	44.823.993.000	102.359.679.000	104.049.479.000	101.569.964.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.702.000.000	4.145.200.000	4.145.200.000	4.043.605.000	4.747.845.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.135.937.000	7.035.937.000	7.035.937.000	7.035.937.000	9.129.773.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.119.072.000	36.119.072.000	33.189.475.000	32.654.865.000	31.304.865.000
Jumlah	167.696.923.000	131.447.908.000	187.330.430.000	203.264.025.000	202.741.892.000

- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2017	442.407.000,-	442.407.000,-	437.734.803,-	98,94%
2	2018	127.409.046.000,-	131.005.429.000,-	124.560.504.811,-	95,08%
3	2019	119.235.387.000,-	114.043.533.000,-	112.772.162.094,-	98,89%
4	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	160.550.090.938,-	98,72%
5	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	202.562.649.458,-	99,91%



	2017	2018	2019	2020	2021
PAGU AWAL 	442.407.000	127.409.046.000	119.235.387.000	138.187.896.000	167.696.923.000
PAGU AKHIR 	442.407.000	131.005.429.000	114.043.533.000	162.636.267.000	202.741.892.000
REALISASI 	437.734.803	124.560.504.811	5112.772.162.094	160.550.090.938	202.562.649.458

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 160.550.090.938,- atau mencapai 98,72% dari pagu akhir Rp. 162.636.267.000,-. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 202.562.649.458,- atau mencapai 99,91% dari pagu akhir Rp. 202.741.892.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

(dalam ribuan rupiah)

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Pagu	Realisasi (Rp.)	%	Pagu	Realisasi (Rp.)	%	Pagu	Realisasi (Rp.)	%	Pagu	Realisasi (Rp.)	%
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	6,036,848	5,946,269	945,013	15.89	5,946,269	2,188,796	36.81	5,926,269	3,704,090	62.50	5,583,575	5,582,922	99.99
4638 Pelayanan Transportasi Darat	34,757,437	33,377,437	3,586,022	10.74	34,653,870	20,100,007	58.00	49,553,870	26,040,543	52.55	50,405,870	50,390,599	99.97
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	77,945,629	44,823,993	7,065,928	15.76	102,359,679	27,592,799	26.96	104,049,479	56,306,400	54.12	101,569,964	101,459,168	99.89
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5,702,000	4,145,200	936,560	22.59	4,145,200	2,348,443	56.65	4,043,605	2,996,786	74.11	4,747,845	4,745,220	99.94
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7,135,937	7,035,937	2,674,587	38.01	7,035,937	4,350,622	61.83	7,035,937	5,870,776	83.44	9,129,773	9,127,656	99.98
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36,119,072	36,119,072	7,035,966	19.48	33,189,475	16,496,178	49.70	32,654,865	23,672,665	72.49	31,304,865	31,257,084	99.85
Jumlah	167,696,923	131,447,908	22,244,075	16.92	187,330,430	73,076,845	39.01	203,264,025	118,591,260	58.34	202,741,892	202,562,649	99.91

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir TA. 2021 adalah sebesar **Rp.202.562.649.458,-** atau mencapai **99,91%** dari total pagu sebesar **Rp.202.741.892.000,-**.

- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

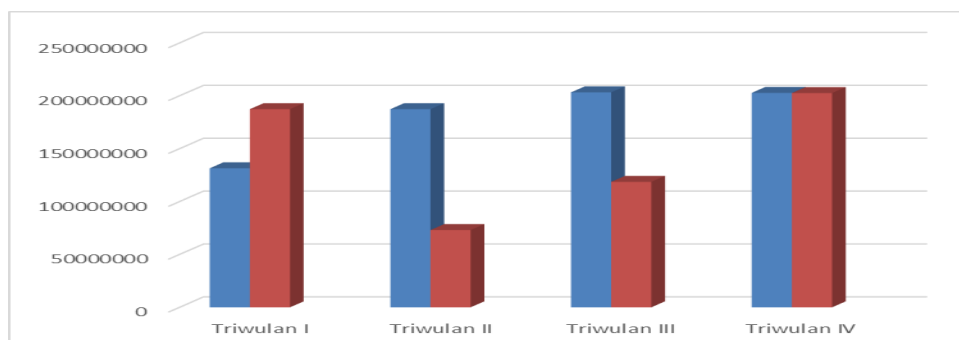
(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu TW I (Rp.)	Realisasi TW I		Pagu TW II (Rp.)	Realisasi TW II		Pagu TW III (Rp.)	Realisasi TW III		Pagu TW IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	Belanja Pegawai	36,119,072	7,035,966	19.48	33,189,475	16,496,178	49.70	32,654,865	23,672,665	72.49	31,304,865	31,257,084	99.85
2	Belanja Barang	54,781,908	9,207,731	16.81	67,446,194	24,964,071	37.01	67,324,599	45,371,408	67.39	69,427,395	69,401,449	99.96
3	Belanja Modal	40,546,928	6,000,378	14.80	86,694,761	31,616,596	36.47	103,284,561	49,547,187	47.97	102,009,632	101,904,116	99.90
TOTAL		131,447,908	22,244,075	16.92	187,330,430	73,076,845	39.01	203,264,025	118,591,260	58.34	202,741,892	202,562,649	99.91

- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu TW I (Rp.)	Realisasi TW I		Pagu TW II (Rp.)	Realisasi TW II		Pagu TW III (Rp.)	Realisasi TW III		Pagu TW IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	Rupiah Murni	115,548,508	22,244,075	19.25	170,154,597	61,806,887	36.32	169,498,392	102,641,926	60.56	168,370,019	168,199,013	99.90
2	PNBP	15,899,400	-	0.00	15,899,400	11,269,958	70.88	17,589,200	15,609,203	88.74	18,195,440	18,187,203	99.95
3	SBSN	-	-	0.00	1,276,433	-	0.00	16,176,433	340,132	2.10	16,176,433	16,176,433	100.00
TOTAL		131,447,908	22,244,075	16.92	187,330,430	73,076,845	39.01	203,264,025	118,591,260	58.34	202,741,892	202,562,649	99.91



	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TARGET 	131.447.908	187.330.430	203.264.025	202.741,982
REALISASI 	22.244.075	73.076.845	118.591.260	202.562.649
CAPAIAN	16,92%	39,01%	58,34%	99,91%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2021 dari Triwulan I – III mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 16,92% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 39,01% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 58,34% dan di akhir Triwulan IV atau akhir Tahun Anggaran 2021 ditutup dengan realisasi mencapai 99,91%..

- Analisis Dana Yang Tidak Terserap

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	31.304.865.000	31.257.084.130	47.780.870
2	Belanja Barang	69.427.395.000	69.401.449.426	25.945.574
3	Belanja Modal	102.009.632.000	101.904.115.902	105.516.098
TOTAL		202.741.892.000	202.562.649.458	179.242.542

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	168.370.019.000	168.199.013.116	171.005.884
2	PNBP	18.195.440.000	18.187.203.342	8.236.658
3	SBSN	16.176.433.000	16.176.433.000	-
TOTAL		202.741.892.000	202.562.649.458	179.242.542

- Rincian Sisa Anggaran Tahun 2021

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	SISA ANGGARAN
		Rp.	Rp.
			179.242.542
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual		105.516.098
	a. Belanja Barang	69.427.395.000	-
	b. Belanja Modal	102.009.632.000	105.516.098
4	Sisa Non Kontraktual		25.945.574
	a. Belanja Barang		25.945.574
	b. Belanja Modal	-	-
5	Sisa Belanja Pegawai		47.780.870
	Belanja Pegawai	31.304.865.000	47.780.870
TOTAL		202.741.892.000	179.242.542

Dari total pagu anggaran BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 202.741.892.000,- (Dua Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 202.562.649.458,- (Dua Ratus Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 99,91% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 179.242.542,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 0,09%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak Ada Kegiatan yang terblokir;
3. Sisa Kontraktual yang berasal dari belanja modal sebesar Rp 105.516.098,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp 105.516.098,- berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat di realokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA

yang maksimal pengajuan hanya sampai 31 Oktober), sedangkan sisa belanja modal baru diketahui saat akhir tahun setelah adanya pengembalian belanja pada tahun berjalan hasil pemeriksaan intern APIP;

- b. Sisa belanja barang yang merupakan sisa anggaran non kontraktual sebesar Rp 25.945.574,- berasal dari beberapa kegiatan efisiensi dari perjalanan dinas, dll;
4. Sisa sumber dana PNPB sebesar Rp 8.236.658,- berasal dari belanja modal maupun belanja barang di akhir tahun dan tidak dapat dilakukan realokasi dikarenakan dapat mengubah pagu penggunaan PNPB tiap satker yang membutuhkan proses persetujuan ke Kementerian Keuangan hingga 1 bulan, sedangkan waktu tersebut akan berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan;
5. Sisa Belanja Pegawai Rp. 47.780.870,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Masih terdapat sisa belanja pegawai walau telah dilaksanakan optimalisasi/refocusing dikarenakan adanya kebijakan tidak dicairkannya gaji dan tunjangan ke-14 di Tahun 2021.

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan sumber daya berdasarkan program per Triwulan I-IV Tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi TW IV)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	100%	15.89%	84.11%	110%	36.81%	73.19%	104.76%	62.50%	42.26%	100%	99.99%	0.01%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	10.74%	89.26%	116.67%	58%	58.67%	104.37%	52.55%	51.82%	100%	99.97%	0.03%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	100%	15.76%	84.24%	104.17%	26.96%	77.21%	102.42%	54.12%	48.30%	100%	99.89%	0.11%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	22.59%	77.41%	100%	56.65%	43.35%	100%	74.11%	25.89%	100%	99.94%	0.06%
TOTAL		100%	16.25%	83.76%	108.29%	44.61%	63.11%	103.46%	60.82%	42.07%	100%	99.95%	0.05%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,95% menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 0,05%.

III.3.4. Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan, berbeda dengan Tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan seperti banyak pekerjaan yang mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan karena pembatasan aktivitas, dll. Pada Tahun 2021 ini memang kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi namun berkaca pada pengalaman pada tahun sebelumnya kita relatif masih bisa mengantisipasi kondisi serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Namun pada akhirnya, kami BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dapat menuntaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi target kinerja maupun pencapaian realisasi anggaran yang sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun kedua, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2021 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
 - b. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - c. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebanyak 10 dari target 10 Lokasi;
 - d. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda terealisasi sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - e. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 0% dari target 0%;
 - f. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;

- g. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar 0% dari target 0%;
 - h. Persentase penerapan SMART terminal tipe A sebesar 100% dari target 100%;
 - i. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP sebesar 100% dari target 100%;
 - j. Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 80% dari target 80%;
 - k. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 35% dari target 35%;
 - l. Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan sebanyak 21 dari target 21 Lokasi;
 - m. Jumlah ketersediaan taman edukatif sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - n. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebanyak 0 dari target 0 Orang;
 - o. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* sebanyak 0 dari target 0 Unit;
 - p. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 0% dari target 0%;
 - q. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebanyak 0 dari target 0 Lokasi;
 - r. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan realisasi nilai 0 dari target nilai 0.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;

3. Realisasi pencapaian kinerja Tahun 2021 BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dengan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebesar 102,65%.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TAHUN 2021			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	TERCAPAI	Memastikan Terminal Tipe-A yang beroperasi telah mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 1.4	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
		2	SK2Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0	0	0	100%	TERCAPAI
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A			%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Sarana dan Prasarana pendukung penerapan SMART Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP			%	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
3	SK4Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	80	100%	TERCAPAI	Memastikan Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terus dilakukan peningkatan guna menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TAHUN 2021			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	35	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya kesadaran para pengusaha Angkutan Barang untuk secara aktif mendukung terwujudnya penurunan jumlah angka pelanggaran pada UPPKB.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	21	21	21	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya penyediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
		IKK 7.b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Seksi TSDP
4	SK5 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	0	0	0	100%	TERCAPAI	-	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Lampiran III	Rencana Aksi Tahun 2021
Lampiran IV	Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021
Lampiran V	Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021
Lampiran VI	Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021
Lampiran VII	Revisi Rencana Aksi II Tahun 2021
Lampiran VIII	Monitoring Rencana Aksi Tahun 2021

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Penyusunan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal	lokasi	1
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)		
		• Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri		
		a. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	17
		a. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan		
		• APJ	m'	821
		• Rambu	buah	334
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	616
		• Warning Light	unit	65
		• Jumlah ATCS Baru	paket	2
		IKK 5 Penyusunan Bahan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4
		a. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• APJ	unit	212
		• Warning Light	unit	2
		• APIL	paket	3
		IKK 6 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan		
		a. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2021		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	20

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	Laporan	1
		IKK 12 Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
		IKK 13 Monitoring dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Laporan	1
		IKK 14 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai		
		a. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	Laporan	1
		b. Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	Laporan	1
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di BPTD	IKK 15 Nilai AKIP	Nilai	80
		IKK 16 Tingkat Penyerapan Anggaran	%	98

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 17 Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		IKK 18 Penyelenggaraan Belanja Pergawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

Bandung, 2 Januari 2020

Pihak Pertama



DEENY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

Bandung, 2 Januari 2021

Pihak Pertama



DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEENY MICHELS ADLAN, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2021

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama

DEENY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		a. Ketataklasanaan Oprasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Berbasis Excellent service Terminal Tipe A Guntur Melati, Garut	Paket	1
		b. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)		
		• Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB Losarang (Lanjutan II)	lokasi	1
		IKK 2 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri		
		a. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	Paket	1
		IKK 4 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Paket	17

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan		
		• APJ	m'	821
		• Rambu	buah	334
		• Pagar Pengaman Jalan	m'	616
		• Warning Light	unit	65
		• Jumlah ATCS Baru	paket	1
		IKK 5 Penyusunan Bahan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Paket	4
		a. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		• APJ	unit	212
		• Warning Light	unit	2
		• APIL	paket	3
		IKK 6 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan		
		a. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9
		IKK 7 Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2021		
		a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	Paket	3
2.	Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 8 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 9 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1
		IKK 10 Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi	Laporan	12

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		administrasi terhadap pelanggran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)		
		IKK 11 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	Laporan	1
		IKK 12 Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1
		IKK 13 Monitoing dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Laporan	1
		IKK 14 Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	Kegiatan	1
		IKK 15 Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai		
		a. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	Laporan	1
		b. Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	Laporan	1
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di BPTD	IKK 16 Nilai AKIP	Nilai	81.86
		IKK 17 Tingkat Penyerapan Anggaran	%	98
		IKK 18 Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		IKK 19 Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Rp. 6.036.848.000
2.	Terminal Penumpang Tipe A dikelola	Rp. 24.757.437.000
3.	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	Rp. 10.000.000.000
4.	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Rp. 4.720.279.000
5.	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Rp. 5.899.400.000
6.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 9.614.836.000
7.	Rehabilitas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB Losarang) (Lanjutan Tahap II)	Rp. 9.162.222.000
8.	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Rp. 7.289.550.000
9.	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	Rp. 300.000.000
10.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Rp. 40.959.342.000
11.	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 5.702.000.000
12.	Oprasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 6.735.937.000
13.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Rp. 400.000.000
14.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 36.119.072.000
—	TOTAL	RP 167.696.923.000

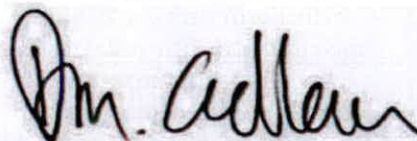
Bandung, 2 Januari 2021

Pihak Kedua



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama



DEENY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)			
1	SP1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKP 1	Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)																		
				a. Penyusunan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal	lokasi	1	Terminal Penumpang Tipe A Guntur Melati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	3.000.000.000	SARPRAS	
				b. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)																		
				1. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB	lokasi	1	Revitalisasi/Rehabilitasi UPPKB Losarang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	9.162.222.000	SARPRAS	
2	SP2	Meningkatnya Kinerja pelayanan Perhubungan	IKP 2	Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri																		
				a. pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri	laporan	1	Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan, dan Industri Karoseri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	170.000.000	SARPRAS	
			IKP 3	Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Kegiatan	17	1.Karawang-Cikampek 2.Cikampek-Subang 3.Jatibarang-Lohbener 4.Cianjur-Sukabumi 5.Sd Barang-Cidaun 6.Cileunyi-Nagrek-Malambung-Gentong 7.Kuningan-Ciamis 8.Cirebon-Kuningan 9.Jatibarang-Palimanan-Cirebon 10.Cimahi-Padalarang-Cianjur 11.Soreang-Cimareme 12.Ciamis-Banjar 13.Cibadak-Sukabumi 14.Soreang-Rancabali-Cidaun 15.Padalarang-Purwakarta 16.Cileunyi-Kadipaten 17.Perlintasan Sebidang	0	9	17	17	17	17	17	17	17	17	Rp	40.959.342.000	LLAJ		
					a. Penyusunan bahan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan																	
					• APJ	m'	821	Pemasangan APJ Baru	0	300	500	821	821	821	821	821	821	821	821	Rp	31.037.084.000	LLAJ
				• Rambu	buah	334	Pemasangan Rambu Tiang F,OH Baru	0	100	200	334	334	334	334	334	334	334	334	Rp	459.584.000	LLAJ	
				•Pagar Pengaman Jalan	m'	616	Pemasangan Pagar Pengaman Baru	0	200	400	616	616	616	616	616	616	616	616	Rp	811.888.000	LLAJ	
				• Warning Light	unit	65	Pemasangan Warning Light Baru	0	20	40	65	65	65	65	65	65	65	65	Rp	2.649.660.000	LLAJ	
				• Jumlah ATCS Baru	paket	2	1. Pembangunan ITS KOTA BANDUNG	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp	10.000.000.000	LLAJ	
			IKK 4	Penyusunan Bahan Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	1.Ruas Karawang-Subang-Indramayu-Cirebon. 2.Padalarang-Cianjur-Sukabumi 3.Cileunyi -Subang-Kadipaten-Cirebon 4.Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar	0	0	0	1	1	2	2	4	4	4	4	Rp	16.451.772.000	LLAJ	
					a. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
					• APJ	unit	212	Pemeliharaan APJ	0	0	0	50	50	50	100	100	212	212	212	212	Rp	2.703.709.000

				• Warning Light	unit	2	Pemeliharaan Warning Light	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	Rp	2.703.709.000	LLAJ
				• APIL	paket	3	Pemeliharaan Apil	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	3	Rp	2.703.709.000	LLAJ
			IKK 5	Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan																	
				a. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan	trayek	9	1.Subsidi Keperintisan Bandung 2.Subsidi keperintisan Bogor	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	Rp	6.036.848.000	LLAJ
			IKK 6	Penyusunan bahan rencana penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2021																	
				a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)	lokasi	20	1.Bandung Barat, Cianjur dan Kota Cirebon 2.Kabupaten Majalengka 3.Kota banjar dan Tasikmalaya	0,5	0,5	0,5	1	2	5	20	20	20	20	20	Rp	9.614.836.000	LLAJ
			IKK 7	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1	monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	290.000.000	SARPRAS
			IKK 8	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	laporan	1	monitoring kinerja dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	290.000.000	SARPRAS
			IKK 9	Penyusunan bahan evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kegiatan	12	pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran termasuk over dimension and over loading pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	7.289.550.000	LLAJ	
			IKK 10	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	Laporan	1	kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang LLAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	290.000.000	LLAJ
			IKK 11	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	1	Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1.400.000.000	LLAJ
			IKK 12	Monitoing dan Pembahasan Evaluasi Andalalin	Laporan	1	Evaluasi Andalalin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	290.000.000	LLAJ
			IKK 13	Penyusunan bahan evaluasi dan monitoring kinerja dalam kegiatan Transportasi Sungai																	
				a. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	Laporan	1	Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Bidang LLASDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	65.000.000	TSDP
				b. Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	Laporan	1	Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rp	290.000.000	TSDP
3	sp 3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di BPTD	IKK 14	Nilai AKIP	Nilai	80	Nilai AKIP 2021	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		TU
			IKK 15	Tingkat Penyerapan Anggaran	%	98	Penyerapan Anggaran 2012	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98		TU
			IKK 16	Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12	ADM KANTOR BPTD IX JABAR 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	44.884.924.000	TU
			IKK 17	Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12	Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	36.119.072.000	TU



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Bandung, 2 Januari 2021

Pihak Pertama



DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)
NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.926.269.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 34.653.870.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 104.049.479.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.035.605.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.035.937.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 33.189.475.000
	TOTAL	RP 188.898.635.000

Bandung, 2 Januari 2021

Pihak Kedua



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama



DEENY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(21)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	0%	0%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp	6.036.848.000	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-																
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.LELUWITRANJANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Rp	24.757.437.000	SARPRAS
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-																
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-																
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-																
2	SP2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-																
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	30%	25%	26%	22%	26%	30%	26%	24%	26%	30%	23%	100%	Rp	24.757.437.000	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-																
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp	40.959.342.000	LLAJ
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	34%	32%	33%	27%	29%	29%	26%	33%	30%	27%	24%	35%	Rp	7.289.550.000	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	0	0	0	7	7	6	20	20	20	20	20	20	Rp	9.614.836.000	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-																
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-																
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-																
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-																
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	-																
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-																

Bandung, 02 Januari 2021
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

DENNY MICHELS ADLAN, ST., MM
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19790205 200604 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bandung, Desember 2021

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 5.583.575.000
2.	Program Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 50.405.870.000
3.	Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 101.569.964.000
4.	Program Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.747.845.000
5.	Program Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 9.129.773.000
6.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp 31.304.865.000
	TOTAL	RP 202.741.892.000

Bandung, Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

DENNY MICHELS ADLAN, ST, MM

Penata TK.I (III/d)
NIP. 19790205 200604 1 002

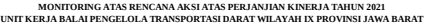


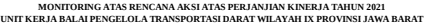
REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

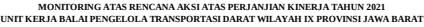
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Damri Perintis Bandung dan Damri Perintis Bogor	0%	0%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp 5,583,575,000	LLAJ
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.LEUWIPANJANG	1	2	3	3	3	8	8	9	9	9	10	10	Rp 24,427,437,000	SARPRAS
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
2	SP2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SARPRAS	
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp 24,427,437,000	SARPRAS
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	80%	Rp 74,884,839,000	LLAJ
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp 7,575,870,000	LLAJ
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	21	Terpasang di Daerah Jawa Barat	1	3	5	5	5	15	15	16	19	19	21	21	Rp 5,899,400,000	LLAJ
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LLAJ
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SARPRAS
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SARPRAS
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TSDP
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TU		

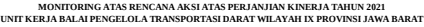
Bandung, Desember 2021
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX PROVINSI JAWA BARAT

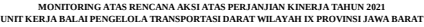
DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19790205 200604 1 002

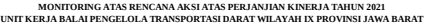
[illegible]

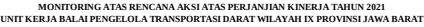
[illegible]

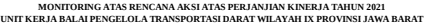
[illegible]

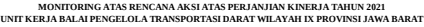
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]